



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2011 – 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tahun 2011 – 2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.16/Men/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2009 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.14/Men/2009 tentang Mitra Bahari;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2011 – 2030.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RSWP3K adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat regional.
2. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antarilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) RSWP3K Tahun 2011 – 2030 sebagai pedoman bagi Daerah dalam melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RSWP3K Tahun 2011 – 2030 setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 3

- (1) Sistematika RSWP3K Tahun 2011 – 2030 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. BAB III : Kerangka Strategi dan Pengelolaan Pembangunan
 - d. BAB IV : Kaidah Pelaksanaan dan Pemantauan
- (2) RSWP3K Tahun 2011 – 2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 September 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 September 2011

PLT. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2011
TANGGAL 15 SEPTEMBER 2011

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan domain utama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hal ini secara tegas dan jelas disebutkan pada Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk kepulauan.” Indonesia memiliki jumlah pulau terbanyak di dunia yaitu lebih dari 17.504 dan panjang garis pantai kurang lebih 95.181 km, dengan beragam sumber daya alam yang berlimpah dan kompleks, serta memiliki nilai ekonomis dan strategis penting. Kekayaan sumber daya alam wilayah pesisir tersebut harus dikelola secara arif dan bijaksana sebagai sumber ekonomi produktif penggerak pembangunan nasional dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara arif, bijaksana, terpadu, dan berkelanjutan.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memiliki panjang pantai 113 km, memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai sumber daya sangat potensial, seperti terumbu karang, lobster, ikan, kepiting, dan rajungan, wisata dan jasa lingkungan, serta kekayaan laut lain yang memiliki nilai ekonomi penting dan strategis dalam perdagangan lokal, nasional, regional, dan internasional. Untuk meningkatkan nilai ekonomi sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan konsep dan strategi pengelolaan secara profesional, lestari, dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai instansi teknis terkait, disertai peran serta dunia usaha dan partisipasi aktif masyarakat.

Pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah Istimewa Yogyakarta semakin beragam seiring dengan semakin meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan, yang diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bermukim di wilayah pesisir. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, disertai dengan berbagai peruntukannya seperti permukiman, perikanan, pertanian, pariwisata, perhubungan, dan lain-lain, maka semakin meningkat pula tekanan terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir. Peningkatan tekanan penduduk dan aktivitas manusia tentunya menjadi potensi ancaman keberadaan, kelestarian, dan kelangsungan ekosistem dan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. Satu hal yang lebih memprihatinkan adalah kecenderungan kerusakan lebih disebabkan oleh paradigma dan praktek pembangunan yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (Sahubawa, dkk., 2009).

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan, perlu dirumuskan konsep pengelolaan yang mampu mengintegrasikan setiap kepentingan dalam keseimbangan (*proporsionalitas*) antara dimensi ekologis, sosial, dan ekonomi, antarsektor, antardisiplin ilmu, dan segenap pelaku pembangunan (*pemangku kepentingan*). Penyusunan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan serta karakteristik wilayah, yang diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan ekonomi, perbaikan kualitas lingkungan serta menghindari adanya konflik jangka panjang. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan untuk berbagai sektor pembangunan memiliki kompleksitas isu, permasalahan, peluang, dan tantangan pengembangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dinyatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau adalah suatu rangkaian kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya yang dilakukan antarsektor, antarpemerintah dan pemerintah daerah, antarekosistem darat dan laut, serta antarilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan untuk melindungi (konservasi dan rehabilitasi), memanfaatkan dan memperkaya sumber daya serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. Disamping itu, pengelolaan wilayah tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lestari. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu disusun rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah diwajibkan menyusun rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP-3-K) yang meliputi:

- 1) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K);
- 2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K);
- 3) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K); dan
- 4) Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K).

Dalam implementasinya, dokumen Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan/atau sebagai komplemen dari penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) selama 20 (dua puluh) tahun, dan sekurang-kurangnya dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali. Rencana kegiatan tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2. TUJUAN

1.2.1. Tujuan Penyusunan RSWP-3-K

1.2.1.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) Provinsi DIY yang hendak dicapai yaitu “perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pembangunan”.

1.2.1.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIY adalah:

- 1). Menyusun rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi DIY sebagai acuan dalam penentuan dan penetapan rencana strategis pengelolaan dan pelaksanaan program sektor pembangunan terkait untuk mengoptimalkan berbagai kegiatan yang memanfaatkan potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil (P3K) serta potensi lain yang mendukung pengembangan kawasan.
- 2). Menyusun kebijakan serta rencana aksi pemanfaatan, perlindungan (konservasi dan rehabilitasi), serta pengembangan sumber daya P3K serta lingkungannya secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
- 3). Menciptakan keberlanjutan pengelolaan sumber daya P3K secara sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antarpemerintah daerah (daerah-daerah perbatasan), antarsektor, dunia usaha, dan masyarakat.
- 4). Meningkatkan peran serta dan inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya P3K secara bertanggung jawab dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi untuk masyarakat.

1.3. RUANG LINGKUP RSWP-3-K

1.3.1. Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah RSWP-3-K meliputi:

- 1). Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi DIY dengan batas wilayah ke arah laut sepanjang 12 mill dan ke arah darat dengan batas wilayah kecamatan yang memiliki pesisir.
- 2). Wilayah kecamatan yang mempunyai garis pantai, meliputi 13 (tiga belas) kecamatan, yaitu:
 - a) Kabupaten Gunungkidul (6 Kecamatan): Kecamatan Girisubo, Tepus, Tanjungsari, Purwosari, Saptosari, dan Panggang.
 - b) Kabupaten Bantul (3 Kecamatan): Kecamatan Kretek, Sanden, dan Srandakan.
 - c) Kabupaten Kulon Progo (4 Kecamatan): Kecamatan Galur, Wates, Panjatan, dan Temon.

1.3.2. Lingkup Materi

RSWP-3-K Provinsi DIY memuat:

- a) Pendahuluan yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup disusunnya RSWP-3-K.
- b) Gambaran umum kondisi daerah berisi diskripsi umum, keadaan sumber daya pesisir pulau-pulau kecil, pola penggunaan lahan dan perairan serta kondisi sosial, budaya dan ekonomi.
- c) Kerangka kebijakan strategi berisi visi dan misi, isu pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tujuan dan sasaran serta target dan indikator.
- d) Kaidah pelaksanaan berisi langkah-langkah untuk melaksanakan RSWP3K dan memantau kemajuan kerja.

1.4. KEDUDUKAN RSWP-3-K DALAM RENCANA PEMBANGUNAN

RSWP-3-K merupakan kebijakan publik yang dimaksudkan untuk memastikan upaya-upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat menjadi arus utama dalam pembangunan. Dokumen ini memberikan arah kebijakan lintas sektor untuk perencanaan pembangunan melalui penetapan isu, tujuan, sasaran, dan strategi, serta target pelaksanaan dengan indikator pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tepat.

RSWP-3-K juga harus disusun dengan mengacu kepada beberapa landasan dan ditujukan untuk mendorong peran serta dan keterpaduan antarpemerintahan, antarinstansi, swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara komprehensif. Diharapkan dokumen yang telah disusun dapat menjadi acuan bagi semua instansi dan pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Beberapa strategi harus dikembangkan sebagai paduan untuk menjabarkan program ke dalam rencana-rencana kegiatan.

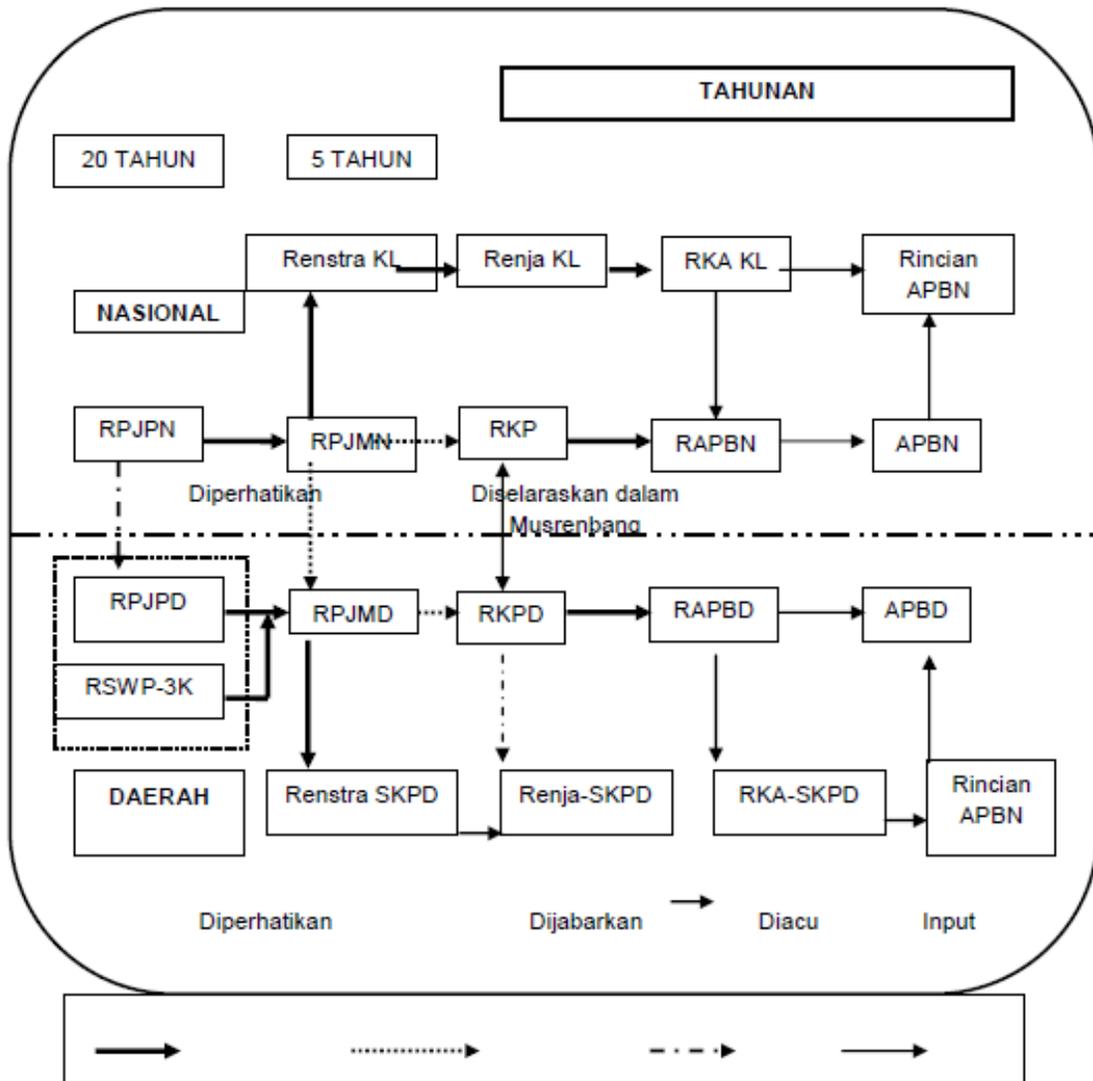
Sementara itu, strategi pelaksanaan rencana dirumuskan untuk mengarahkan implementasi rencana secara konsisten. Strategi adopsi dan pelembagaan dokumen dirumuskan dalam upaya memperkuat status legalitas dokumen serta memantapkan kedudukan dan fungsi dokumen RSWP-3-K dalam sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Hal terpenting dari upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah terbangunnya komitmen semua instansi dan pihak yang terkait dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu perlu dikembangkan kerja sama dan komunikasi yang harmonis antarpemangku kepentingan sehingga keterpaduan pengelolaan di daerah dapat terwujud secara maksimal.

Selanjutnya, perlu dilakukan upaya-upaya sehingga dokumen RSWP-3-K agar bisa terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka menjamin konsistensi pelaksanaan dokumen RSPW-3-K yang sudah disusun, maka hasil tersebut perlu menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah. Artinya pemerintah daerah perlu menyusun tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang telah memasukkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dokumen RSWP-3-K diharapkan berfungsi sebagai instrumen yang akan dipakai sebagai referensi kebijakan dan program kegiatan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sampai dengan beberapa tahun ke depan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dokumen RSWP-3-K harus: (a) sejalan dan menjadi bagian dari sistem dan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta (b) dilaksanakan secara konsisten oleh masing-masing sektor, baik daerah maupun pusat.

Pada dasarnya, integrasi dokumen RSWP-3-K tersebut sejalan dengan sistem dan konsep perencanaan pembangunan yang ada (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004) sebagaimana ilustrasi pada Gambar 1-1. Tampak bahwa adopsi dan pelembagaan dokumen tersebut dilakukan dengan menjadikan dokumen RSWP-3-K sebagai *input* dalam penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan Renstra SKPD.



Gambar 1-1. Kedudukan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K)

1.5. DEFINISI DAN PERISTILAHAN

- 1) **Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) **Wilayah Pesisir** adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Secara operasional, batas ke arah darat ditentukan sebagai batas kecamatan pesisir dan ke arah laut adalah 12 mil untuk provinsi dan 1/3 (satu pertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/ kota.
- 3) **Pulau Kecil** adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

- 4) **Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, jasa-jasa lingkungan, sumber daya ikan; terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi laut yang terdapat di wilayah pesisir.
- 5) **Ekosistem** adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan nonorganisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
- 6) **Bioekoregion** adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.
- 7) **Perairan Pesisir** adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
- 8) **Kawasan** adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
- 9) **Perencanaan** adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.
- 10) **Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.
- 11) **Rencana Strategis** adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran, dan strategi yang luas, serta pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
- 12) **Rencana Zonasi** adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
- 13) **Rencana Pengelolaan** adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka mengkoordinasikan pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.

- 14) **Rencana Aksi Pengelolaan** adalah tindak lanjut Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan.
- 15) **Rencana Zonasi Rinci** adalah rencana detail dalam satu zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh pemerintah daerah.
- 16) **Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
- 17) **Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
- 18) **Sempadan Pantai** adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- 19) **Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
- 20) **Reklamasi** adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase.
- 21) **Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
- 22) **Mitigasi Bencana** adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 23) **Pencemaran Pesisir** adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

- 24) **Pemangku Kepentingan Utama** adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat pesisir.
- 25) **Pemberdayaan Masyarakat** adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.
- 26) **Konsultasi Publik** adalah suatu proses penggalan dan dialog masukan, tanggapan, dan sanggahan antara pemerintah daerah dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan antara lain melalui rapat, musyawarah/rembug desa, dan lokakarya.
- 27) **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 28) **Satuan Kerja Perangkat Daerah** adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab pada pelaksanaan tugas di bidang tertentu di provinsi, atau kabupaten kota.
- 29) **Instansi terkait** adalah instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah, unit pelaksana teknis, dan instansi vertikal.
- 30) **Masyarakat** adalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 31) **Masyarakat Adat** adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
- 32) **Masyarakat Lokal** adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 33) **Masyarakat Tradisional** adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisonalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
- 34) **Kearifan Lokal** adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- 35) **Pemerintah Pusat**, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 36) **Pemerintah Daerah** adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- 37) **Menteri** adalah menteri yang bertanggung jawab dibidang kelautan dan perikanan.
- 38) **Direktur Jenderal** adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pantai pasir ini spesifik dan biasanya pasirnya terdiri dari endapan pecahan karang yang bercampur dengan pasir.

Bentukan asal yang kedua adalah vulkanik terdenudasi berupa lereng dan perbukitan terdenudasi (*denudational slope and hills*), mencakup sebagian daerah di sebelah barat Kecamatan Purwosari hingga perbatasan Kecamatan Kretek Bantul. Ciri dari bentukan ini adalah lereng yang relatif terjal dan licin pada saat hujan, serta rawan mengalami gerakan tanah. Bentuk asal yang terakhir adalah bentukan asal fluvial, mencakup semua pantai di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Karakter dari bentukan asal fluvial adalah dataran pantai yang landai dan tersusun atas endapan sedimen yang belum terkonsolidasi seperti debu, lumpur, pasir, dan kerikil.

Secara umum daerah perencanaan memiliki lereng datar (0-2%) terutama di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo dengan ketinggian berkisar 0 hingga 50 m dari permukaan laut (dpl). Sedangkan daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki lereng bervariasi mulai dari 2% hingga lebih dari 40% dengan ketinggian berkisar 0 hingga 250 m.

2.1.3. Geologi

Satuan batuan penyusun daerah perencanaan yaitu endapan kuartar berupa endapan Formasi Sentolo, sedangkan di bagian barat tersusun atas breksi dan lava andesit Formasi Andesit Tua. Sebaran batuan dasar tersebut dapat dilihat aluvial yang luas dan tebal. Sedangkan pada daerah Pegunungan Seribu (Kabupaten Gunungkidul), struktur geologi yang berkembang di bagian selatan terdiri dari kekar dan sesar.

2.1.4. Iklim dan Curah Hujan

Keadaan iklim di wilayah pesisir Provinsi DIY dicirikan oleh curah hujan yang berkisar 1.580 - 2.300 mm/tahun, suhu udara harian 26 - 28 °C, dan zone agroklimat menurut Schmidt dan Ferguson tergolong C3 - D2. Keadaan fisik lingkungan lainnya adalah angin relatif kencang disertai uap garam yang tinggi.

2.1.5. Hidro-osenografi

2.1.5.1 Batimetri

Kedalaman maksimum laut di selatan pantai DIY hingga sejauh 12 mil mencapai 500 m. Semakin ke arah selatan, kedalaman perairan Samudra Hindia secara gradual bertambah lebih curam hingga mencapai kedalaman 4000 m. Daerah ini merupakan palung laut yang memanjang dari arah barat ke timur. Ini merupakan zona tumbukan antara lempeng tektonik samudra dengan lempeng tektonik benua Asia.

2.1.5.2. Pasang Surut

Pasang surut merupakan proses naik-turunnya permukaan air laut (*mean sea level*) secara berkala, yang ditimbulkan oleh gaya tarik-menarik dari benda-benda angkasa terutama bulan dan matahari terhadap massa air di bumi. Perairan selatan Yogyakarta memiliki tipe pasang surut *mixed tide predominantly semi diurnal* atau pasang campuran yang condong ke harian ganda. Ini berarti dalam satu hari terjadi 2 (dua) kali pasang dan 2 (dua) kali surut.

2.1.5.3. Arus

Arus yang terjadi di perairan Laut Selatan DIY ditimbulkan oleh gelombang datang, dengan 2 (dua) pola arus yang dibentuk oleh arus menyusur pantai (*longshorecurrent*) dan arus meratas pantai (*rip current*). Gelombang yang datang menuju pantai dapat menimbulkan arus pantai (*nerashore current*) yang berpengaruh terhadap proses sedimentasi dan abrasi pantai. Pola arus pantai ditentukan oleh besarnya sudut yang dibentuk oleh gelombang atau ombak datang menuju garis pantai. Jika sudut datang gelombang besar, maka akan terjadi arus menyusur pantai yang disebabkan oleh tekanan hidrostatik air. Sudut datang gelombang di perairan Pantai Selatan DIY kurang lebih 110° , sehingga lebih dominan membentuk arus menyusur pantai. Sebaliknya jika sudut datang gelombang lebih kecil atau sama dengan nol, maka akan terjadi arus meratas pantai dengan arah yang menjauhi pantai, disamping terbentuk arus menyusur pantai (Anonim, 2008).

Pola arus menyusur pantai berdampak besar terhadap pengangkutan material pasir, sedimen, dan sampah pantai. Kondisi ini terlihat jelas di sepanjang Pantai Selatan Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Pada beberapa wilayah pantai seperti di teluk dan muara sungai terjadi penumpukan material pasir, sedangkan di tempat lain terjadi penggerusan pantai akibat terangkutnya material pasir oleh masa air yang ditimbulkan oleh gelombang datang.

2.1.5.4. Ombak dan Gelombang

Umumnya wilayah perairan Laut Selatan Jawa dan khususnya di Pantai Selatan DIY, ombak dan gelombang yang dihasilkan cukup besar dan sering dikatakan sebagai daerah yang sangat ganas karena menimbulkan abrasi sepanjang tahun dan sewaktu-waktu menelan korban jiwa. Berdasarkan hasil kegiatan prasurevei 2010, tercatat ketinggian gelombang di masing-masing 2 (dua) titik di sepanjang pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul, total 6 (enam) titik, berkisar antara 2,25 m – 3,30 m. Dari hasil pengamatan, besarnya gelombang Laut Selatan DIY dipengaruhi secara langsung oleh kondisi oseanografi perairan Samudera Hindia yang sangat luas, dengan kondisi angin yang bertiup cukup kuat sepanjang tahun. Kondisi ombak atau gelombang di sepanjang pantai Selatan DIY relatif sama besar, namun cenderung lebih tinggi di pantai Kabupaten Gunungkidul. Tinggi dan besarnya gelombang laut, selain dipengaruhi oleh kondisi oseanografi Samudera Hindia, juga dipengaruhi topografi pantai pesisir setempat. Terdapat kecenderungan di wilayah bertebing karang (Kabupaten Gunungkidul) memiliki gelombang yang lebih tinggi dan besar dibandingkan daerah landai dan bermaterial pasir, seperti di pantai Kabupaten Bantul dan Kulon Progo.

2.1.5.5. Suhu dan Salinitas

Suhu perairan Laut Selatan Jawa cenderung lebih rendah dan salinitas tinggi dibandingkan perairan Laut Utara Jawa. Kondisi ini menunjukkan bahwa perairan pesisir Pantai Utara Jawa sudah terpengaruh dengan aktivitas manusia dan industri, yang semakin meningkat dibandingkan pantai Selatan. Menurut Anonim (2008), suhu perairan pesisir pantai Selatan DIY berkisar $25,5^{\circ}\text{C}$ – $27,5^{\circ}\text{C}$, sama halnya dengan kondisi di muara-muara sungai. Sedangkan salinitas perairan laut cukup tinggi, yakni berkisar 31,5 – 33,0 ppt. Salinitas muara sungai berkisar 24,5 – 26,0 ppt, juga relatif lebih tinggi dibandingkan salinitas perairan Laut Utara Jawa yang berkisar 15,0 ppt – 19,0 ppt (Pusat Studi Lingkungan Hidup Undip, 2007).

2.1.5.6. Kecerahan dan Kekeruhan

Kecerahan perairan pesisir DIY hampir konstan sepanjang tahun dengan kondisi kecerahan yang rendah dan atau kekeruhan yang tinggi akibat proses abrasi pantai oleh ombak dan gelombang. Ombak dan gelombang yang sangat besar di pantai Selatan DIY, memiliki daya perusak pantai yang juga sangat besar, sekaligus menimbulkan efek pencucian yang tinggi terhadap material (pasir dan tanah) pembentuk garis pantai. Akibatnya terjadi kekeruhan sepanjang waktu, dimana material pasir dan tanah yang menimbulkan kekeruhan tersebut dapat mengganggu pola migrasi ikan.

2.1.6. Kebencanaan

2.1.6.1 Gempa Bumi

Penyebaran gempa bumi di wilayah Indonesia terkonsentrasi di daerah penujaman lempeng tektonik. Gempa dangkal terdapat di sepanjang bagian barat Sumatra, bagian selatan Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Maluku, Sulawesi, Papua, dan di daerah-daerah sesar. Gempa menengah tersebar di sepanjang pantai barat Sumatra, kemudian di Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Maluku dan Sulawesi. Sedangkan gempa dalam tidak terdapat di Sumatra, tetapi mulai muncul dari Jawa Tengah sebelah utara, Nusa Tenggara bagian utara hingga di sebelah barat Maluku dan Sulawesi. Sebagian besar gempa bumi yang terjadi di Indonesia adalah gempa dangkal (70%), sisanya adalah gempa menengah dan gempa dalam. Sebagian besar episenter gempa (lebih dari 70%) tersebar di bawah permukaan laut.

Di Provinsi DIY tercatat tidak kurang dari 15 (lima belas) kali per tahun terjadi gempa bumi berkekuatan lebih dari 5 skala Richter. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa Provinsi DIY termasuk daerah rawan gempa bumi. Wilayah perencanaan merupakan daerah yang terpotong oleh Sesar Opak. Sesar Opak adalah sesar yang memotong batuan tersier dan tertutup oleh endapan gunung api muda. Sesar ini merupakan bagian dari Graben Yogyakarta, yaitu sesar turun berundak yang memanjang dari utara ke selatan di bagian timur kota Yogyakarta. Sesar ini di lapangan dapat dilihat pada tebing berlereng curam di sepanjang Sungai Opak. Sesar ini telah mengalami reaktivasi pada 27 Mei 2006 saat terjadi gempa besar di Provinsi DIY dan Jawa Tengah. Pelepasan energi gempa menjalar dan mengakibatkan sesar ini aktif kembali.

2.1.6.2. Tsunami

Gelombang tsunami berbeda dengan gelombang laut lainnya yang bersifat kontinu, gelombang tsunami ditimbulkan oleh gaya impulsif yang bersifat insidental dan tidak kontinu. Periode gelombang tsunami berkisar 10 – 60 menit dengan panjang gelombang mencapai 100 km. Kecepatan penjarangan tsunami sangat tergantung dari kedalaman laut dan penjarangannya dapat mencapai ribuan kilometer. Apabila tsunami mencapai pantai, maka kecepatannya dapat mencapai 50 km/jam dan energinya sangat merusak daerah pantai yang dilaluinya.

Bencana yang diakibatkan oleh tsunami tergantung antara lain pada magnitude gempa, morfologi laut, lingkungan pantai, bentuk pantai, infrastruktur di pantai dan jumlah penduduk. Kejadian tsunami di Pantai Selatan DIY dan sekitarnya tercatat setidaknya ada 7 (tujuh) kali kejadian besar yaitu pada tahun 1823 (Pantai Selatan Jawa), 1840 (Pantai Selatan Jawa), 2 (dua) kali pada 1859 (Pantai Selatan Jawa), 1862 (Cirebon), 1904 (Cilacap) dan 2006 (Pangandaran).

2.1.6.3. Banjir

Banjir pada umumnya terjadi di daerah yang dekat dengan muara Sungai Opak seperti daerah Poncosari, Banaran, Brosot, dan Srandakan. Sedangkan di sekitar bantaran Sungai Bogowonto, banjir terjadi di daerah seperti Sindutan, Palihan, dan Temon. Lokasi lain yang memiliki potensi banjir adalah daerah di sekitar bantaran Sungai Serang seperti Glagah Sarang, dan Bojong. Banjir ini disebabkan muara sungai yang tertutup oleh sedimen pada musim kemarau akibat proses gelombang laut dan disusul terjadinya hujan deras di daerah hulu sehingga air tidak dapat langsung menuju laut.

2.1.6.4. Kekeringan

Kekeringan pada umumnya terjadi di Gunungkidul. Hal ini dikarenakan batuan penyusun di Gunungkidul adalah batu gamping. Batu gamping memiliki sifat mudah meloloskan air dan mudah larut oleh air. Sifat mudah larut mengakibatkan banyaknya rongga, goa, dan sungai bawah tanah. Dengan demikian pada daerah karst jarang dijumpai adanya sungai permukaan. Air hujan yang jatuh diteruskan ke dalam kekar, celah, dan sungai bawah tanah menuju laut. Akibatnya air yang tersimpan di daerah ini sangat sedikit dan pada musim kemarau mengalami kesulitan air.

2.1.6.5. Abrasi

Abrasi atau erosi pantai merupakan proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut atau arus laut yang bersifat merusak. Kerusakan pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam di daerah tersebut baik secara alami maupun pengaruh campur tangan manusia. Semua daerah pantai di Kabupaten Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo, baik pantai tebing maupun pantai pasir, memiliki potensi abrasi yang tinggi, sebagai akibat dari gelombang Pantai Selatan DIY yang sangat besar.

2.2. SUMBER DAYA PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

2.2.1. Ekosistem Sumber Daya Pesisir

2.2.1.1. Terumbu karang

Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY (2009), perkiraan luasan ekosistem terumbu karang mencapai 5.100 ha, yang tersebar di perairan pantai Kabupaten Gunungkidul dengan kondisi kerusakan berat mencapai 3.500 ha, kerusakan sedang 1.020 ha, dan kondisi baik 510 ha. Ekosistem terumbu karang di Pantai Selatan DIY memiliki fungsi dan nilai strategis, terutama sebagai habitat biota laut ekonomis penting (lobster dan ikan demersal). Berdasarkan data dan informasi nelayan penangkap lobster, kondisi ekosistem terumbu karang mulai terancam karena terdapat praktek-praktek penangkapan udang yang tidak ramah lingkungan dan tidak bertanggung jawab. Kondisi ini ditemui di wilayah perairan berbatasan antara Gunungkidul dan Wonogiri. Salah satu solusi yang harus dilakukan untuk mencegah kerusakan adalah dengan memfungsikan kelompok masyarakat pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan secara efektif.

2.2.1.2. Padang Lamun

Sebagai ekosistem perairan laut dangkal, lamun sangat potensial sebagai sumber makanan bagi biota laut. Secara ekologis lamun hanya ditemukan di perairan pantai di selatan Kabupaten Gunungkidul, khususnya di sekitar Pantai Kukup sampai dengan Ngandong. Sedang untuk perairan pantai di selatan Kabupaten Kulon Progo dan Bantul tidak ditemukan lamun. Hal tersebut erat kaitannya dengan sifat dasar perairan dan adanya pengaruh dari adanya beberapa aliran sungai yang ada di dua kabupaten ini.

2.2.1.3. Hutan Bakau (Mangrove)

Sebagian besar ekosistem hutan bakau (sekitar 90%) tersebar di muara Congot Kulon Progo, sebagian kecil lainnya (10%) tersebar di Pantai Pandansimo sampai Samas Bantul (Sahubawa, dkk., 2007). Kondisi hutan bakau di Muara Congot hanya sebagian kecil saja yang berada dalam kondisi baik dan cukup baik, sebagian besar lainnya dalam kondisi memprihatinkan atau rusak akibat kurang mendapatkan penanganan dari pihak terkait, termasuk masyarakat di sekitarnya. Menurut Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi DIY (2009), luas hutan bakau di Kabupaten Kulon Progo mencapai 55 ha. Sementara itu di Kabupaten Bantul pada beberapa tahun terakhir telah ditanami dengan 10.000 bibit. Ekosistem hutan bakau memiliki fungsi yang sangat vital dari aspek ekologi dan ekonomi, terutama dalam mempertahankan stabilitas substrat, mencegah erosi dan abrasi, sumber makanan biota laut, tempat pemijahan biota laut, serta bahan baku kayu bakar dan bangunan rumah.

2.2.1.4. Gumuk Pasir (*Sand-dune*)

Ekosistem gumuk pasir tersebar secara merata di sepanjang pantai Kabupaten Bantul sampai Kulon Progo. Volume dan luasan wilayah gumuk pasir terbesar ditemui di Pantai Parangtritis, Parangkusumo, Depok dan Samas, Pandansimo, Glagah dan Congot. Di kawasan ekosistem gumuk pasir telah dilakukan penghijauan cemara udang, serta sebagian kecil mangrove, akasia, dan beberapa jenis tanaman lainnya yang tumbuh subur. Ekosistem gumuk pasir memiliki fungsi ekonomis dan ekologis penting, yakni sebagai kawasan wisata, areal penghijauan (cemara udang, akasia, pandan laut, dll) yang subur, serta sebagai laboratorium riset di bidang geomorfologi. Fungsi lingkungan penting lain adalah sebagai barier penahan ombak, gelombang, serta kenaikan massa air laut dan tsunami.

2.2.1.5. Ekosistem Hutan Cemara Udang

Ekosistem hutan cemara udang tersebar secara merata di sepanjang Pantai Kabupaten Kulon Progo sampai Pantai Depok dan Parangtritis pada lahan gumuk pasir (sekitar 85%), serta sebagian kecil lainnya (15%) di Pantai Kabupaten Gunungkidul. Ekosistem hutan cemara lebih berfungsi meredam kecepatan angin, selain sebagai barier penahan abrasi dari hantaman ombak dan gelombang.

2.2.2. Pulau-Pulau Kecil

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang dimaksud pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² beserta kesatuan ekosistemnya. Menurut ketentuan di atas, Provinsi DIY memiliki 28 pulau-pulau kecil yang tersebar di sepanjang pesisir Kabupaten Gunungkidul (Tabel 2-2). Pulau-pulau tersebut secara fisik merupakan pulau-pulau karang yang relatif tidak luas dan tidak berpenghuni.

Tabel 2-2. Nama Pulau-Pulau Kecil di Provinsi DIY

No.	Nama Pulau (terdapat dalam acuan Peta Rupabumi)	No.	Nama Pulau (tidak terdapat dalam acuan Peta Rupabumi)	No.	Nama Pulau (temuan baru)
1.	Ngrawe	14.	Watutogog	23.	Watukubengan
2.	Watupayung	15.	Watumanukan	24.	Watunganten
3.	Drini	16.	Watusemar	25.	Watutopi
4.	Lumpino	17.	Watulumbang	26.	Kalong
5.	Watulawang	18.	Karangmomang	27.	Rokoh
6.	Timang	19.	Gununggandul	28.	Payung
7.	Ngondo	20.	Godek		
8.	Watupayung	21.	Baron		
9.	Watupanjang	22.	Layar		
10.	Watulambur				
11.	Watubebek				
12.	Jungwok				
13.	Glatik				

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY, 2007

2.2.3. Sumber Daya Ikan

Provinsi DIY memiliki panjang garis pantai 113 km. Menurut Pasal 3 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan laut Provinsi DIY adalah sejauh 12 mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas. Wilayah perairan ini diperkirakan memiliki luas 624 mil² atau 1.616,15 km². Sumber daya ikan yang terkandung di dalamnya sangat banyak dan beragam, seperti aneka jenis ikan pelagis kecil, pelagis besar (tuna, cakalang, tongkol, tengiri, dll), ikan demersal, cucut, udang penaeid, lobster, dll. Potensi lestari sumber daya ikan tersebut tersaji pada Tabel 2-3.

Tabel 2-3. Potensi Lestari Sumber Daya Ikan di Perairan Laut Selatan

Jenis Ikan	Potensi Lestari (ton)			Tingkat Pemanfaatan (%)
	Perikanan Pantai	Selatan Jawa	Samudera Hindia	
1. Pelagis kecil	3.200	159.000	430.000	41,0
2. Pelagis besar				
a. Tuna	-	32.000	92.000	45,0
b. Cakalang	-	25.000	113.000	26,0
c. Tongkol	-	18.000	55.000	44,0
d. Tengiri	-	-	36.000	11,0
3. Demersal	400	112.700	135.000	84,0
4. Cucut	-	10.000	28.000	-
5. Udang Paneid	550	5.500	11.000	61,0
6. Lobster	40	1.000	1.600	45,0
7. Cumi-cumi	100	1.000	3.800	-
Jumlah	4.290	364.200	905.400	
Jumlah Boleh Ditangkap	3.432	291.360	724.320	

Sumber : Anonim, 2007

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan RI (WPP-RI), wilayah perairan di selatan Provinsi DIY sekarang masuk ke dalam WPP-RI 573 yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian barat. Berdasarkan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) pada tahun 2006, secara umum tingkat eksploitasi di WPP-RI 573 untuk ikan demersal, udang, pelagis kecil neritik (kecuali pelagis kecil oseanik) dan ikan pelagis besar sudah berada pada kondisi jenuh (*fully exploited*), artinya tingkat pemanfaatan telah melebihi 80%. Namun demikian demikian, masih terdapat peluang besar untuk memanfaatkan ikan pelagis besar dengan armada perikanan tangkap berkapasitas hingga 50 GT di wilayah perairan ZEEI.

2.3. POLA PENGGUNAAN LAHAN DAN PERAIRAN

2.3.1. Pola Penggunaan Lahan

Data penggunaan lahan umum di wilayah pesisir Provinsi DIY diambil dari analisis Citra Aster tahun 2009 dan diperbaharui (*update*) di lapangan. Penggunaan lahan yang paling dominan adalah semak belukar. Ini berarti dari segi pengembangan perencanaan fisik maupun nonfisik bukan merupakan faktor pembatas. Penggunaan lahan secara rinci tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2-11

Penggunaan Lahan di Wilayah Pesisir Provinsi DIY

Kabupaten/ Kecamatan	Penggunaan Lahan (ha)							
	Hutan	Kebun	Pemukiman	Sawah	Semak belukar	Tanah kosong	Tegalan	Tubuh air
Kulon Progo								
Temon		1.517,39	285,26	1.188,56	327,93		847,09	424,90
Wates		3.771,43	1.596,31	622,49	545,25		1.443,86	424,90
Penjatan		2.847,21	1.177,45	1.263,15	488,40		1.183,40	425,05
Galur		2.536,89	1.292,64	1.711,41	476,10	61,39	873,37	424,90
Bantul								
Srandakan		1.416,42	150,47	808,39	202,72	49,80	624,94	424,90
Sanden		1.666,98	302,07	2.149,78	224,71	96,98	201,68	426,04
Kretek		1.775,33	403,72	1.475,55	1.876,76	101,96	25.014,26	424,90
Gunungkidul								
Purwosari	184,58	247,63	329,91		3.589,80		24.997,74	432,76
Panggang	20,23	1.282,41	466,89		4.374,52		25.294,47	440,89
Saptosari		17,47	689,18	48,34	1.798,01	3,93	24757,92	439,51
Tanjungsari	11,17	72,25	576,19		1.027,27	17,75	24.662,85	436,16
Tepus			726,45		5.743,76	11,59	25.124,27	437,60
Girisubo		1.963,08	642,08	72,49	3.871,86	6,40	27.475,71	450,04
Jumlah	215,99 (0,09%)	19.114,55 (8,27%)	8.638,68 (3,74%)	9.340,18 (4,04%)	24.547,15 (10,62)	349,83 (0,15%)	182.501,61 (78,93%)	5.612,64 (2,43%)

Sumber: Analisis Citra Aster (2009)

Pola penggunaan lahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil didominasi oleh tegalan seluas 182.501,61 ha atau 78,93% sisanya adalah untuk semak belukar, kebun, sawah, permukiman, tubuh air dan hutan yang luasnya secara berturut-turut adalah 24.547,15 ha; 19.114,56 ha; 9.340,187 ha; 8.638,68 ha; 5.612,64 ha dan 215,99 ha. Bidang pertanian merupakan kegiatan utama bagi sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir Provinsi DIY.

Wilayah pesisir Provinsi DIY memiliki potensi pariwisata bahari sangat besar. Wilayah pantai di Kabupaten Gunungkidul yang telah dikembangkan dalam sektor pariwisata antara lain adalah Pantai Baron, Kukup, Drini, Sundak, Krakal, Siung, Wediombo, Sadeng, dan Ngrenehan. Beberapa pantai di Kulon Progo yang potensial untuk dikembangkan dalam sektor pariwisata antara lain adalah Pantai Glagah dan Congot. Sedangkan di Kabupaten Bantul potensi wisata bahari yang telah dikembangkan adalah Pantai Parangtritis, Pandansimo, Parangwedang, Samas, Depok, Parangkusumo, dan Kuwaru. Secara umum, pantai-pantai tersebut memiliki pemandangan yang eksotis dan banyak dikunjungi wisatawan baik domestik maupun manca negara.

Sebetulnya pengembangan kegiatan perikanan laut di wilayah pesisir Provinsi DIY juga tidak bisa terlepas dari kegiatan pariwisata yang telah berkembang relatif lebih dahulu. *Multiplier effect* kedua sektor tersebut dapat menumbuhkan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat seperti warung makan atau restoran hasil laut, kios-kios kerajinan hasil laut, serta usaha penginapan atau hotel yang memiliki kontribusi penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir pada khususnya dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada wilayah pesisir, bidang pertanian hanya memiliki beberapa komoditi utama yang memiliki tingkat produksi relatif lebih besar dibandingkan komoditi yang lain, yaitu padi ladang, jagung, ketela pohon, dan kacang tanah, serta beberapa komoditas hortikultura. Dari sisi ketersediaan lahan, maka komoditi tersebut masih potensial dikembangkan di wilayah pesisir. Faktor potensi ini akan lebih berkembang apabila diiringi dengan pola tanam yang lebih intensif. Sementara itu, faktor yang menghambat adalah ketersediaan air yang tidak konstan dan relatif terbatas.

2.3.1. Pola Penggunaan Perairan

Provinsi DIY memiliki panjang garis pantai 113 km. Menurut Pasal 3 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan laut Provinsi DIY adalah sejauh 12 mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas. Wilayah perairan ini diperkirakan memiliki luas 624 mil² atau 1.616,15 km², dengan sumber daya ikan yang terkandung di dalamnya sangat banyak dan beragam, seperti aneka jenis ikan pelagis kecil, pelagis besar (tuna, cakalang, tongkol, tengiri, dll), ikan demersal, cucut, udang penaeid, lobster, dll. Penggunaan wilayah perairan di selatan Provinsi DIY hingga kini masih sangat terbatas. Kendala utama yang dihadapi adalah gelombang laut yang sangat tinggi dan cenderung berbahaya, sehingga dituntut tindakan antisipatif dan kewaspadaan yang tinggi dalam setiap penggunaannya. Hingga kini penggunaan wilayah perairan tersebut oleh masyarakat Provinsi DIY masih terbatas pada kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan armada perahu motor tempel dan kapal motor. Mengingat gelombang laut yang sangat tinggi, perahu tradisional atau tanpa motor tidak dapat beroperasi di wilayah perairan tersebut.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 607 Tahun 1976 *jo* No. 392 Tahun 1999 tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan, maka jalur penangkapan ikan di perairan laut Provinsi DIY dapat dibedakan menjadi 3 yaitu jalur I yang memanfaatkan perairan hingga jarak 6 mil dari garis pantai, jalur II berjarak 6-12 mil, dan jalur III berjarak 12 mil hingga batas terluar ZEEI.

Ketiga jalur penangkapan ikan tersebut pada prinsipnya telah digunakan oleh nelayan di Provinsi DIY. Jalur I dan II dimanfaatkan untuk menangkap udang (lobster), ikan demersal, ikan pelagis kecil neritik, serta ikan pelagis besar berukuran kecil. Penangkapan ikan di kedua jalur tersebut pada umumnya menggunakan perahu motor tempel. Pangkalan pendaratan ikan bagi perahu motor tempel ini tersebar di Kulon Progo (Bogowonto, Sindutan, Glagah, Karangwuni, Bugel, dan Trisik), Bantul (Pandansimo, Kwaru, Samas, dan Depok), dan Gunungkidul (Gesing, Ngrenehan, Baron, Drini, Sundak, Siung, Wediombo, dan Sadeng). Sementara itu penangkapan ikan di jalur III biasa menggunakan kapal motor berkapasitas 10 GT atau lebih dengan sasaran utama kelompok ikan pelagis besar (madidihang, tuna, cakalang, tengiri, dll) atau pelagis kecil oseanik. Penangkapan ikan pelagis besar pada umumnya menggunakan sarana pengumpul ikan berupa "rumpon" yang dipasang di perairan laut yang berjarak sekitar 40-80 mil. Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng merupakan satu-satunya pelabuhan di Provinsi DIY yang mampu didarati kapal motor.

Perairan laut Provinsi DIY kadang-kadang juga menjadi perlintasan bagi kapal-kapal barang khususnya kapal tangker dengan tujuan dari atau ke Pelabuhan Cilacap. Jalur kapal ini berada di dalam radius 6-12 mil dengan kedalaman laut berkisar 100-200 m. Pada tahun 2001 sebuah kapal tangker yang mengalami kerusakan di laut, terbawa oleh gelombang laut yang sangat tinggi dan akhirnya terdampar dan tenggelam di sekitar Pantai Congot.

2.4. KONDISI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR

2.4.1. Adat dan Sikap Mental

Kebudayaan yang dianut oleh masyarakat pesisir di Provinsi DIY adalah kebudayaan Jawa, hal ini terlihat dari cara mereka berperilaku dan berbahasa dengan keluarga maupun tetangga. Bahasa sehari-hari yang digunakan di lingkungan keluarga maupun dalam berinteraksi antar warga masyarakat adalah Bahasa Jawa, dengan memperhatikan kaidah-kaidah halus dan kasar. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi di lingkungan sekolah, kantor atau dalam berkomunikasi dengan orang lain yang bukan dari wilayah mereka.

Suku bangsa Jawa merupakan suku bangsa yang kehidupannya bersifat seremonia. Orang Jawa dikenal memiliki kebiasaan untuk menyelenggarakan *slametan* (selamatan). Dalam komunitas Jawa, terdapat ritus yang berhubungan dengan peristiwa kehidupan manusia yang disebut titik-titik poros insidental (Suryadi, 1983), titik-titik yang secara turun temurun dianggap mempunyai makna penting dan makna vital, sebagai inti kejadian pada dimensi waktu dan dimensi ruang. Dari kejadian insidental yang bermakna penting dan vital itulah suatu tanda hidup bermula dan berakhir, ke titik tanpa ujung. Titik poros insidental awal berhubungan dengan kelahiran seorang manusia sedangkan titik poros insidental akhir berhubungan dengan kematian seorang manusia. Ritus religius terpenting dalam masyarakat Jawa adalah *slametan* yang diadakan pada semua peristiwa penting dalam hidup seperti kehamilan, kelahiran, sunat, perkawinan, pemakaman, sebelum panen padi, sesudah naik pangkat, maupun peristiwa lainnya pada kesempatan dimana keselamatan kosmis perlu dijamin kembali (Suseno, 1991).

Sistem organisasi sosial atau kekerabatan yang dianut masyarakat adalah sistem patrilineal, yaitu menurut garis ayah. Struktur-struktur kekerabatan mencakup keluarga sebagai unit terkecil. Dalam rumah tangga, pihak laki-laki yang melamar perempuan dan cenderung lebih dominan memimpin keluarganya. Setelah menikah, mempelai wanita diboyong terlebih dahulu ke kediaman orang tua dari pihak laki-laki sebelum mereka menempati rumah sendiri.

Dalam kehidupan masyarakat, manusia dibekali untuk berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya tertentu. Keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan masyarakat untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya terikat dalam Etika Jawa (Suseno, 1991). Ada dua kaidah yang paling menentukan pola pergaulan dalam masyarakat Jawa, yang semestinya diajarkan kepada generasi muda, menjadi pengetahuan, dan petuah yang berharga yaitu prinsip “rukun” dan “hormat”. Kaidah pertama mengatakan bahwa dalam setiap situasi manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa hingga tidak sampai menimbulkan konflik. Kaidah kedua menuntut agar manusia dalam cara berbicara dan membawa diri selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Nilai-nilai yang diajarkan kepada generasi muda tersebut merupakan kendali atau kontrol untuk menghadapi berbagai perubahan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat dewasa ini seiring dengan proses globalisasi yang mengarah kepada individualistis dan materialistis. Etika Jawa tersebut diajarkan agar generasi penerus menghargai sesuatu yang “Njawani”.

2.4.2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Secara keseluruhan jumlah penduduk pada tahun 2009 yang terbanyak berada di Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo, yaitu sebanyak 40.140 jiwa. Namun demikian, besarnya jumlah penduduk tersebut tidak diimbangi dengan luas wilayah yang terbesar pula. Wilayah terluas dimiliki oleh Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul dengan luas 104,91 km². Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul memiliki tingkat kepadatan tertinggi yaitu 1.705 jiwa per km². Jumlah kepala keluarga (KK) terbesar berada di Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo yaitu 10.958 KK (Tabel 2-16).

Tabel 2-16
Luas, Jumlah, Kepadatan dan Jumlah KK Tahun 2008

Kabupaten	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (jiwa/km ²)	Jumlah KK
Kulon Progo	Temon	36,30	25.528	703	7.085
	Wates	32,00	40.140	1254	10.958
	Panjatan	44,59	32.723	734	9.051
	Galur	32,91	27.180	826	7.767
Bantul	Srandakan	18,32	31.240	1.705	9.050
	Sanden	23,16	34.513	1.490	10.373
	Kretek	26,77	31.980	1.195	8.254
Gunungkidul	Panggung	99,80	26.561	266	6.832
	Purwosari	71,76	18.795	262	4.579
	Saptosari	87,83	35.511	404	9.284
	Tepus	104,91	33.794	322	8.988
	Tanjungsari	71,63	26.448	369	7.593
	Girisubo	94,57	23.825	252	6.568
Jumlah		744,55	388.238	9.782	106.382

Sumber: Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul dalam Angka (2009)

Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari Temon, Wates, Panjatan, dan Galur, memiliki total luas wilayah 145,8 km². Total jumlah penduduk di wilayah tersebut adalah 125.571 jiwa (34.861 KK), sehingga rata-rata kepadatan penduduknya adalah 861 jiwa/ km².

Tiga kecamatan di Kabupaten Bantul yang terdiri dari Srandakan, Sanden, dan Kretek memiliki total luas wilayah 63,25 km², dengan total jumlah penduduk sebesar 97.733 jiwa (27.677 KK). Dengan demikian rata-rata kepadatan penduduk di wilayah tersebut adalah 1.545 jiwa/ km².

Enam kecamatan di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki wilayah pesisir secara keseluruhan memiliki total luas 530,5 km². Luas wilayah tersebut merupakan yang paling luas diantara dua kabupaten yang lain. Total jumlah penduduk di wilayah tersebut adalah 164.934 jiwa, dengan demikian rata-rata kepadatan penduduknya 311 jiwa/km².

2.4.3. Struktur Penduduk

2.4.3.1. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur

Secara keseluruhan struktur penduduk menurut kelompok umur di wilayah pesisir Provinsi DIY didominasi oleh penduduk dewasa (Tabel 2-17). Kondisi ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk produktif (15 – 64 tahun) jauh melebihi penduduk jumlah penduduk belum dan tidak produktif (0 – 14 tahun dan lebih dari 65 tahun).

Tabel 2-17
Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2008

Kabupaten	Kecamatan	Anak-anak	Dewasa	Jumlah
Kulon Progo	Temon	6.097	28.089	34.186
	Wates	12.179	37.793	49.972
	Panjatan	12.273	30.138	42.411
	Galur	9.287	23.913	33.200
Bantul	Srandakan	7.256	24.066	31.322
	Sanden	7.739	26.774	34.513
	Kretek	6.910	25.199	32.109
Gunungkidul	Panggung	9.150	18.952	28.102
	Purwosari	4.939	16.022	20.961
	Saptosari	10.627	28.729	39.356
	Tepus	9.102	29.107	38.209
	Tanjungsari	7.551	20.121	27.672
	Girisubo	531	868	1.399

Sumber: Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul dalam Angka (2009); Data Monografi Kecamatan Girisubo

2.4.3.2. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Struktur penduduk menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul tersaji pada Tabel 2-18. Berdasarkan tabel tersebut, sebagian besar penduduk terdiri dari perempuan, meskipun demikian perbedaannya dengan jumlah penduduk laki-laki tidak terlalu tinggi. Secara keseluruhan nisbah kelamin (*sex ratio*) penduduk laki-laki dan perempuan bernilai lebih dari 90. Kondisi demikian tidak menimbulkan kesenjangan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan.

Tabel 2-18
Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2008

Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Sex ratio
Kulon Progo	Temon	25.528	12.465	13.063	95,42
	Wates	40.140	19.738	20.402	96,74
	Panjatan	32.723	16.019	16.703	95,90
	Galur	27.180	13.314	13.867	96,01
Bantul	Srandakan	31.240	15.194	16.046	94,69
	Sanden	34.513	16.744	17.769	94,23
	Kretek	31.980	15.358	16.622	92,40
Gunungkidul	Panggung	26.561	12.873	13.688	95,05
	Purwosari	18.795	8.999	9.796	91,86
	Saptosari	35.511	17.385	18.126	95,91
	Tepus	33.794	16.145	17.648	91,48
	Tanjungsari	26.448	12.771	13.677	93,38
	Girisubo	23.825	11.481	12.344	93,01

Sumber: Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul dalam Angka (2009)

2.4.3.3. Struktur Penduduk Menurut Tahapan Keluarga

Struktur penduduk menurut tahapan keluarga dikelompokkan menjadi keluarga prasejahtera (pra KS), sejahtera I (KS I), sejahtera II (KS II), sejahtera III (KS III), dan sejahtera III plus (KS III+). Secara keseluruhan jumlah keluarga menurut kelompok tersebut berturut-turut adalah 27.939; 36.013; 24.739; 30.120; dan 3.338 (Tabel 2-21).

Perbandingan jumlah keluarga prasejahtera di empat kecamatan di Kabupaten Kulon Progo tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok. Keluarga prasejahtera terbanyak terdapat di Panjatan yaitu 3.962 keluarga. Perbandingan jumlah keluarga prasejahtera di Kabupaten Bantul juga tidak menunjukkan perbedaan yang besar. Kecamatan Sanden merupakan daerah yang mempunyai jumlah keluarga prasejahtera terbanyak yaitu 1.986 keluarga. Sementara itu Kabupaten Gunungkidul mempunyai jumlah keluarga prasejahtera sebanyak 14.016 keluarga. Saptosari merupakan kecamatan yang memiliki jumlah keluarga prasejahtera terbanyak.

Tabel 2-22
Struktur Penduduk menurut Tahapan Keluarga Tahun 2008

Kabupaten	Kecamatan	Tahapan Keluarga				
		Pra KS	KS I	KS II	KS III	KS III+
Kulon Progo	Temon	1.294	1.182	1.170	2.684	1.197
	Wates	2.723	2.280	1.298	5.334	734
	Panjatan	3.962	1.924	903	3.485	178
	Galur	1.358	1.590	1.646	4.371	102
Bantul	Srandakan	1.133	3.691	2.510	2.607	353
	Sanden	1.986	2.271	1.634	4.342	545
	Kretek	1.467	1.792	1.916	4.421	210
Gunungkidul	Panggung	1.434	3.185	3.199	669	-
	Purwosari	1.080	1.776	1.655	1.661	-
	Saptosari	4.759	4.075	1.562	546	19
	Tepus	3.769	5.419	2.247	-	-
	Tanjungsari	2.022	2.736	3.011	-	-
	Girisubo	952	4.092	1.988	-	-
Jumlah		27.939	36.013	24.739	30.120	3.338

Sumber: Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul dalam Angka, 2009

Keterangan:

- tidak ada data di Kecamatan Tepus, Tanjungsari, dan Girisubo yang menunjukkan jumlah keluarga KS III
- tidak ada data di Kecamatan Tepus, Tanjungsari, Girisubo, Panggang dan Purwosari yang menunjukkan jumlah keluarga KS III+.

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa kecamatan pesisir yang memiliki tahapan keluarga prasejahtera tertinggi adalah di Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo (3.962), Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul (1.986) dan Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul (4.759).

Keluarga Sejahtera I pada kecamatan pesisir yang tertinggi berada di Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo (2.280), Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul (3.691) dan Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul (5.419). Tahapan Keluarga Sejahtera II tertinggi ada di Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo (1.298), Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul (2.510), dan Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul (3.199). Keluarga Sejahtera III di wilayah pesisir tertinggi ada pada Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo (5.334), Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul (4.421). Pada kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul untuk tahapan Keluarga Sejahtera III dan III+ tidak ada catatan lengkap.

2.4.3. Pertumbuhan Penduduk

Sebaran pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kulon Progo cenderung kurang merata. Pertumbuhan penduduk paling besar terjadi di Temon pada tahun 2008 yaitu 12,02% dan paling rendah terdapat di Galur pada tahun 2008, -2,75% (tidak ada pertumbuhan penduduk). Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantul cenderung merata. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2008 paling besar terjadi di Kretek (1,22%) dan paling rendah di Srandakan (0,49%). Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gunungkidul dalam selang waktu 2003-2008 cenderung tidak merata, pada beberapa kecamatan terdapat nilai pertumbuhan penduduk negatif yang berarti tidak ada pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan paling tinggi terjadi di Tepus pada tahun 2006 yaitu sebesar 27,59% dan yang paling rendah terjadi di Tanjungsari pada tahun 2006 sebesar -21,53% (tidak ada pertumbuhan penduduk). Pada tahun 2006 jumlah penduduk di enam kecamatan di Kabupaten Gunungkidul secara keseluruhan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 7.220 jiwa (Tabel 2-23).

Tabel 2-23
Pertumbuhan Penduduk Tahun 2003-2008

Kabupaten/ Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)						Pertumbuhan penduduk (%)				
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2004	2005	2006	2007	2008
Kulon Progo											
1. Temon	22.672	22.710	22.745	22.770	22.788	25.528	0,17	0,15	0,11	0,08	12,02
2. Wates	40.803	40.856	40.906	40.945	40.978	40.140	0,13	0,12	0,10	0,08	-2,04
3. Panjatan	31.295	31.340	31.382	31.414	31.439	32.723	0,14	0,13	0,10	0,08	4,08
4. Galur	27.815	27.857	27.897	27.925	27.948	27.180	0,15	0,14	0,10	0,08	-2,75
Bantul											
1. Srandakan	29.056	29.271	29.429	31.069	31.088	31.240	0,74	0,54	5,57	0,06	0,49
2. Sanden	33.912	34.087	34.195	34.264	34.304	34.513	0,52	0,32	0,20	0,12	0,61
3. Kretek	30.839	31.060	31.316	31.476	31.595	31.980	0,72	0,82	0,51	0,38	1,22
Gunungkidul											
1. Panggang	26.032	26.065	26.098	26.431	26.500	26.561	0,13	0,13	1,28	0,26	0,23
2. Purwosari	18.879	18.982	19.086	18.702	18.751	18.795	0,55	0,55	-2,01	0,26	0,23
3. Saptosari	35.484	35.756	36.029	35.340	35.431	35.511	0,77	0,76	-1,91	0,26	0,23
4. Tepus	26.176	26.264	26.353	33.625	33.714	33.794	0,34	0,34	27,59	5,36	0,24
5. Tanjungsari	33.381	33.459	33.538	26.318	26.387	26.448	0,23	0,24	-21,53	0,26	0,23
6. Girisubo	23.625	23.775	23.925	23.707	23.770	23.825	0,63	0,63	-0,91	0,27	0,23

Sumber: Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul Dalam Angka, 2009

2.4.5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipandang sebagai salah satu ukuran yang dapat merepresentasikan kualitas manusia. IPM disusun berdasarkan tiga indikator yang merupakan tiga kebutuhan pokok manusia, yaitu kesehatan, pendidikan atau pengetahuan, dan ekonomi. Ketiga komponen pokok di atas dapat diterjemahkan ke dalam variabel yang lebih operasional, yaitu kesehatan diwakili oleh angka harapan hidup waktu lahir, pendidikan atau pengetahuan diwakili oleh angka melek huruf dan rata-rata tahun sekolah, sedangkan ekonomi diwakili oleh pengeluaran perkapita.

Pada tahun 2008 IPM di Kabupaten Kulon Progo mencapai 73,26; Bantul 73,38, dan Gunungkidul 70,00. Kabupaten Bantul mempunyai IPM tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Tingginya IPM di Kabupaten Bantul didukung dengan tingginya rata-rata lama sekolah yang mencapai 8,55 tahun dan pengeluaran riil perkapita yang mencapai Rp 642.190,00. Sementara itu rendahnya IPM di Gunungkidul disebabkan oleh rendahnya masing-masing variabel IPM seperti angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Secara umum, selama dua tahun terakhir IPM di masing-masing kabupaten mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan telah terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat (Tabel 2-24).

Tabel 2-24
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2007- 2008

Kabupaten	Angka Harapan Hidup (th)		Angka Melek Huruf (%)		Rata-Rata Lama Sekolah (th)		Pengeluaran Riil Per Kapita (000 Rupiah)		IPM	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Kulon Progo	73,47	73,79	88,69	88,72	7,80	7,80	624,09	628,29	72,76	73,26
Bantul	70,95	71,11	88,46	88,60	8,36	8,55	637,79	642,19	72,78	73,38
Gunungkidul	70,75	70,79	84,50	84,50	7,60	7,60	617,70	621,67	69,68	70,00

Sumber : Provinsi DIY Dalam Angka (2009)

2.5. PEREKONOMIAN WILAYAH

2.5.1. Struktur Ekonomi

Kondisi ekonomi makro di wilayah pesisir Provinsi DIY sangat terkait dengan kondisi makro ekonomi regional pada skala yang lebih luas, khususnya perekonomian makro di wilayah kabupaten dan provinsi. Analisis ekonomi makro ini dapat dicermati dari aspek struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, maupun pergeseran distribusi sektor-sektor ekonomi. Struktur perekonomian daerah telah mengalami pergeseran kontribusi sektor dalam pembentukan PDRB kabupaten selama 2 (dua) tahun terakhir. Kelompok sektor primer masih menjadi kontributor dominan, meski kenaikan per tahun relatif tipis. Kontribusi sektor-sektor sekunder relatif stabil, hal ini dimungkinkan karena pertumbuhan ekonomi dari kelompok ini terus mengalami akselerasi dari tahun ke tahun. Sementara itu sektor-sektor tersier terus mengalami peningkatan kontribusi terhadap pembentukan PDRB.

Dinamika ekonomi makro akan terlihat dari peningkatan nilai riil PDRB dari suatu daerah. Angka ini mengindikasikan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat dari daerah tersebut. Sementara itu, dari sisi struktur perekonomian suatu wilayah, yang terlihat dari proporsi tiap sektor terhadap total nilai perekonomian suatu daerah menunjukkan konsentrasi ekonomi wilayah tersebut. PDRB di tiga kabupaten mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa perekonomian di wilayah pesisir Provinsi DIY mengalami peningkatan secara signifikan. Kondisi ini dapat dicermati pada 2-25.

Tabel 2-25
Perkembangan PDRB Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul atas
Dasar Harga Konstan Tahun 2000, Tahun 2007-2008 (juta)

Lapangan Usaha	Kulon Progo		Bantul		Gunungkidul	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Pertanian	424.719	454.656	838.545	880.148	1.141.404	1.201.241
Pertambangan dan Penggalian	17.689	17.027	35.023	35.828	55.808	55.442
Industri Pengolahan	251.351	255.420	582.328	596.187	332.600	337.144
Listrik, Gas dan Air Bersih	9.611	10.333	29.294	31.675	14.922	16.003
Bangunan	77.911	82.096	413.694	437.151	235.067	250.400
Perdagangan, Hotel dan Restoran	266.357	281.420	659.401	702.353	429.268	447.901
Pengangkutan dan Komunikasi	163.555	171.336	234.814	248.778	206.779	214.371
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	98.325	101.551	202.511	212.888	131.857	141.824
Jasa-Jasa	278.112	288.531	453.340	473.049	393.866	405.972
Jumlah	1.587.630	1.662.370	3.448.949	3.618.060	2.941.288	3.070.298

Sumber: Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul dalam Angka (2009)

Pada tahun 2008, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul lebih rendah jika dibandingkan dengan Bantul dan Kulon Progo yang mencapai 4,90% dan 4,71% (Tabel 2-26). Pada periode yang sama pertumbuhan ekonomi di ketiga kabupaten tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi yang mencapai 4,31% dan 5,02%. Hal ini disebabkan oleh adanya gempa bumi pada pertengahan tahun 2006, yang cukup signifikan pengaruhnya terhadap kinerja ekonomi, serta membutuhkan waktu untuk melakukan pemulihan (*recovery*) ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2008 dicapai oleh Kabupaten Bantul yaitu 4,90%, yang disebabkan oleh tingginya pertumbuhan pada sektor listrik, gas dan air bersih, serta perdagangan, hotel dan restoran. Kontribusi cukup signifikan dari sektor perdagangan, hotel dan restoran di Kabupaten Bantul tidak terlepas dari semakin berkembangnya kegiatan pariwisata di wilayah ini, terutama di wilayah pesisir yang memang cukup potensial bagi pengembangan wisata bahari.

Tabel 2-26
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul atas Dasar
Harga Konstan, Tahun 2007– 2008

Lapangan Usaha	Kulon Progo		Bantul		Gunungkidul	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Pertanian	3,08	7,05	2,92	4,86	1,58	5,27
Pertambangan dan Penggalian	-1,82	-3,74	3,01	2,29	-1,85	-0,66
Industri Pengolahan	3,15	1,62	2,51	2,38	1,43	1,37
Listrik, Gas dan Air Bersih	4,65	7,51	7,99	8,13	1,19	7,25
Bangunan	7,30	5,37	8,32	5,67	8,74	6,52
Perdagangan, Hotel dan Restoran	6,26	5,66	5,64	6,51	8,36	4,34
Pengangkutan dan Komunikasi	3,66	4,76	6,96	5,94	6,27	3,67
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	8,26	3,28	4,71	5,12	8,12	7,56
Jasa-Jasa	2,98	3,75	3,82	4,35	3,62	3,07
PDRB	4,12	4,71	4,52	4,90	3,91	4,39
PDRB Provinsi DIY	4,31	5,02	4,31	5,02	4,31	5,02

Sumber: Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul dalam Angka (2009)

Sektor pertanian masih mendominasi dan memberikan kontribusi terbesar pada PDRB di semua kabupaten, dengan kontribusi rata-rata di atas 20% selama dua tahun terakhir. Kontribusi sektor ini terbesar dicapai oleh Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 38,80% pada tahun 2007 dan 39,12% pada tahun 2008. Hal ini cukup wajar mengingat sebagian besar penduduk Gunungkidul bekerja di sektor pertanian, selain itu lahan pertanian di wilayah tersebut juga masih cukup luas bagi pengembangan sektor ini. Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian di semua kabupaten diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, kemudian sektor jasa-jasa. (Tabel 2-27).

Tabel 2-27
Kontribusi Sektoral terhadap PDRB di Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, Tahun 2007-2008 (juta)

Lapangan Usaha	Kulon Progo		Bantul		Gunungkidul	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Pertanian	26,75	27,35	24,31	24,32	38,80	39,12
Pertambangan dan Penggalian	1,11	1,02	1,01	0,99	1,89	1,88
Industri Pengolahan	15,83	15,36	16,88	16,48	11,31	10,98
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,61	0,62	0,85	0,87	0,50	0,52
Bangunan	4,91	4,94	11,99	12,08	7,80	8,15
Perdagangan, Hotel dan Restoran	16,78	16,93	19,12	19,41	14,60	14,60
Pengangkutan dan Komunikasi	10,30	10,31	6,80	6,88	7,03	6,98
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6,19	6,11	5,87	5,88	4,48	4,62
Jasa-Jasa	17,52	17,36	13,14	13,07	13,39	13,22
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul dalam Angka (2009)

2.5.2. Potensi Wilayah dan Pengembangan Sektor Strategis

Guna melihat sejauh mana kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa terhadap faktor-faktor produksi yang berpartisipasi dalam proses produksi, maka dapat dilakukan dengan mencermati PDRB daerah yang bersangkutan. Perekonomian kecamatan di wilayah pesisir pada tahun 2008 memberikan sumbangan yang cukup baik terhadap perekonomian wilayah kabupaten. Pada tahun 2008, ada beberapa sektor ekonomi yang memberikan andil positif lebih dari 15% terhadap nilai tambah perekonomian wilayah.

Sementara itu, kinerja ekonomi kecamatan di wilayah pesisir juga tidak lepas dari kinerja sektoral yang memberikan andil cukup besar. Pada tahun 2008, tiga sektor utama penyumbang terbesar nilai tambah perekonomian di wilayah pesisir secara berurutan adalah sektor pertanian, dengan kontribusi rata-rata mencapai 38,67%. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pertanian di wilayah pesisir sangat baik dan perlu dikembangkan di masa mendatang dengan tetap berpedoman pada aspek perencanaan wilayah. Dari sisi ketersediaan lahan, maka komoditi pertanian ini masih potensial dikembangkan di wilayah tersebut. Faktor potensi ini akan lebih berkembang apabila diiringi dengan pola tanam yang lebih intensif. Sementara itu, faktor yang menghambat adalah ketersediaan air yang tidak konstan dan sangat terbatas.

Penyumbang terbesar kedua adalah sektor jasa-jasa dengan kontribusi sebesar 15,28%, Sedangkan penyumbang terbesar ketiga adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran yaitu sebesar 14,95%. Besarnya kontribusi kelompok sektor tersier ini mengindikasikan bahwa perekonomian wilayah pesisir semakin menggeliat seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata di wilayah tersebut. Gambaran tersebut dapat dicermati pada Tabel 2-28.

Meskipun wilayah pesisir relatif identik dengan kegiatan perikanan, namun kontribusi sub-sektor tersebut terhadap perekonomian kecamatan masih sangat rendah dibandingkan dengan sub-sektor lainnya yang termasuk dalam sektor pertanian (Tabel 2-29). Kontribusi sub-sektor perikanan di semua kecamatan rata-rata hanya 1,17% terhadap pembentukan nilai tambah perekonomian kecamatan. Bahkan di wilayah Kabupaten Gunungkidul, pantai-pantai yang cukup potensial untuk kegiatan perikanan pun andil sub-sektor ini masih di bawah 5%, demikian pula yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan nilai tambah perekonomian kecamatan terutama berasal dari kinerja sub-sektor tanaman bahan makanan dan peternakan.

2.6. KONDISI SARANA DAN PRASARANA

2.6.1. Prasarana Perhubungan

Transportasi mempunyai fungsi sebagai penggerak, pendorong, dan penunjang pembangunan. Penataan transportasi sangat berkaitan dengan sektor lain baik yang berhubungan dengan kondisi sosial manusia, kesadaran hukum, budaya berperilaku, maupun lingkungan. Pembangunan sektor transportasi di Provinsi DIY diarahkan pada peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan agar tercapai suatu sistem transportasi antar moda yang sesuai dengan kondisi fisik dan geografi wilayah, mampu meningkatkan efektivitas transportasi antar daerah dan kawasan pertumbuhan, serta mampu memberikan pelayanan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

2.6.1.1. Transportasi Darat

1) Jaringan Jalan

Sistem transportasi darat di wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo, Bantul, hingga Gunungkidul sebagian besar memanfaatkan jalan raya sebagai jalur utama pergerakan lalu lintas, baik untuk pergerakan lokal maupun regional yang menghubungkan kota-kota besar lain seperti Yogyakarta, Purworejo, dan Wonogiri. Selain jaringan jalan raya, juga terdapat jaringan rel kereta api Pulau Jawa lintas selatan yang melewati Kecamatan Temon dan Wates. Keberadaan rel kereta api tersebut turut berpengaruh terhadap perkembangan Kabupaten Kulon Progo.

Pengaruh tersebut kian bertambah besar seiring dengan akan beroperasinya jalur rel ganda. Lebih lanjut adanya kebijakan nasional tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) sepanjang 1.556 km yang menghubungkan 5 provinsi di Pulau Jawa, dimulai dari Labuan (Banten) hingga Banyuwangi (Jawa Timur), juga akan mempengaruhi perkembangan jaringan transportasi, arus transportasi, dan perekonomian di wilayah pesisir Provinsi DIY. JJLS yang melintasi Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul mencapai panjang 157 km.

Berdasarkan status dan kewenangan pengelolaan, prasarana jalan raya yang menjadi andalan dalam transportasi darat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Ketiga status jalan tersebut dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul. Sebagian besar jalan raya merupakan jalan beraspal dengan kondisi sedang hingga baik. Status dan kondisi jalan raya di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul pada tahun 2008 secara rinci tersaji pada Tabel 2-30.

Jaringan jalan yang ada di ketiga wilayah Kabupaten pada umumnya belum mencakup wilayah di sekitar pantai dan hanya sebagian kecil saja berdekatan dengan wilayah pantai, yaitu di Kabupaten Kulon Progo (Congot dan sekitarnya). Jaringan jalan yang melayani wilayah di sekitar pantai pada umumnya berupa jalur akses menuju ke kawasan wisata dengan klasifikasi sebagai jalan kabupaten. Jalur akses menuju ke kawasan wisata dengan klasifikasi sebagai jalan Kolektor Primer (jalan provinsi) melayani kawasan wisata pantai Parangtritis. Embrio jalan yang nantinya dijadikan sebagai jalur jalan linstas selatan pulau Jawa di wilayah DIY diklasifikasikan sebagai jalan kolektor primer (jalan provinsi). Jalur ini melayani pergerakan lalu lintas regional skala kecil dan lalu lintas lokal antar wilayah kecamatan di DIY bagian selatan.

Tabel 2-30
Panjang Jalan (km) Menurut Status dan Keadaan Jalan
di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul Tahun 2008

Keadaan Jalan	Kulon Progo			Bantul			Gunungkidul		
	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten
1. Jenis Permukaan	28,57	158,50	925,30	42,24	154,05	899,83	56,11	275,91	818,46
a. Diaspal	28,57	158,50	525,97	42,24	154,05	616,48	56,11	275,91	566,79
b. Kerikil	-	-	284,69	-	-	86,45	-	-	251,67
c. Tanah	-	-	114,64	-	-	196,90	-	-	-
d. Tidak terinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Kondisi Jalan	28,57	158,50	925,30	42,24	154,05	899,83	56,11	275,91	818,46
a. Baik	23,57	126,10	426,98	42,24	154,05	327,61	12,80	24,05	359,50
b. Sedang	5,00	29,40	427,83	-	-	317,87	20,49	176,50	54,87
c. Rusak	-	3,00	58,49	-	-	209,65	22,82	75,36	86,46
d. Tidak terinci	-	-	12,00	-	-	44,70	-	-	317,63
3. Kelas Jalan	28,57	158,50	925,30	42,24	154,05	899,83	56,11	275,91	818,46
a. Kelas I	28,57	-	-	42,24	-	-	56,11	-	-
b. Kelas II	-	158,50	-	-	154,05	-	-	275,91	-
c. Kelas III	-	-	-	-	-	494,23	-	-	-
d. Kelas III A	-	-	115,36	-	-	-	-	-	-
e. Kelas III B	-	-	410,60	-	-	142,30	-	-	-
f. Kelas III C	-	-	292,99	-	-	263,30	-	-	-
g. Tidak terinci	-	-	106,35	-	-	-	-	-	-

Sumber : Provinsi DIY dalam Angka (2009)

2.6.1.2. Transportasi Laut

Transportasi laut di Provinsi DIY hingga kini baru mengakomodasi lalu lintas perahu dan kapal penangkap ikan. Karakteristik gelombang laut yang sangat tinggi dan belum adanya pelabuhan yang representatif, menyebabkan belum memungkinkan beroperasinya kapal penumpang dan kapal niaga di Provinsi DIY. Meskipun demikian wilayah laut di selatan Provinsi DIY sering dilintasi kapal niaga, terutama kapal-kapal dari atau menuju Pelabuhan Cilacap.

Provinsi DIY memiliki beberapa Tempat Pendaratan Kapal (TPK) yang berfungsi sebagai pendaratan kapal penangkap ikan dan sekaligus sebagai tempat wisata pantai. Dalam bidang kelautan dan perikanan TPK tersebut lebih dikenal sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) atau Tempat Pendaratan Ikan (TPI). Secara keseluruhan wilayah pesisir Provinsi DIY memiliki 20 PPI/TPI yang tersebar di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul.

Untuk mendukung operasional transportasi laut, maka telah dibangun beberapa fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) yang berfungsi sebagai panduan bagi kapal-kapal penangkap ikan untuk dapat merapat ke pantai, disamping sebagai petunjuk dan bantuan navigasi daratan bagi kapal-kapal besar. Saat ini terdapat 19 SBNP yang tersebar di seluruh wilayah pesisir Provinsi DIY, 9 unit merupakan milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY dan 10 unit lain merupakan milik Distrik Navigasi Klas III Cilacap. Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pendaratan kapal, juga telah dibangun Pos Pengawasan Pendaratan Pelayaran di beberapa wilayah pesisir.

2.6.2. Jaringan Utilitas

Sistem jaringan utilitas yang ada di wilayah studi khususnya kawasan pesisir di Provinsi DIY diuraikan sebagai berikut.

2.6.2.1. Air Bersih

Pelayanan air bersih dari PDAM Gunungkidul sudah menjangkau wilayah pesisir, khususnya pantai Baron dan Ngobaran. Pelayanan PDAM Bantul baru menjangkau di kecamatan Srandakan. Pelayanan air bersih di wilayah Kabupaten Kulon Progo sudah mencakup 10 (sepuluh) kecamatan dari 12 (dua belas) kecamatan yang ada. Dua kecamatan yang belum terjangkau, yaitu Kecamatan Samigaluh dan Lendah. Pelayanan sumber air bersih dari PDAM masih terbatas di wilayah nonpesisir, sehingga kawasan di pinggir pantai Selatan masih mengandalkan sumur gali.

2.6.2.2. Persampahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Kebersihan di masing-masing Kabupaten, penanganan sampah di kawasan pesisir terkendala dengan jumlah armada dan biaya. Pengelolaan yang dilakukan selama ini dikelola secara mandiri oleh warga setempat. Lokasi TPA (Tempat Pembuangan Sampah Akhir) di masing-masing kabupaten adalah sebagai berikut:

- 1) TPA Banyuroto (Kabupaten Kulon Progo);
- 2) TPA Piyungan (Kabupaten Bantul); dan
- 3) TPA Baleharjo (Kabupaten Gunungkidul).

2.6.2.3. Listrik

Jaringan listrik PLN secara umum sudah menjangkau seluruh wilayah kecamatan di ketiga kabupaten, meskipun untuk wilayah pesisir hanya terbatas pada kawasan wisata. Di wilayah kabupaten Gunungkidul, pelayanan energi listrik PLN sudah menjangkau di kawasan pesisir seperti daerah Baron, Kukup dan Sadeng. Layanan listrik dari PLN lebih ditujukan bagi pelayanan distribusi air bersih oleh PDAM untuk mengoperasikan genset. Selain listrik dari PLN, di wilayah Sundak sudah ada pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang saat ini dikelola oleh penduduk setempat. Lokasi gardu induk yang tersedia di masing-masing wilayah adalah sebagai berikut:

- 1) wilayah Kabupaten Gunungkidul ada 2 (dua) unit trafo dengan kapasitas layanan sebesar 30 MVA. Trafo tersebut berada di Semanu;
- 2) wilayah Kabupaten Kulon Progo, gardu induk berada di Glagah yang mencakup wilayah pelayanan seluruh kawasan pesisir. Trafo 1 phasa dan 3 phasa dengan kapasitas antara 25 sampai dengan 200 KVA sebanyak 108 unit berada Temon – Congot dan di Karangwuni-Wates; dan
- 3) wilayah Kabupaten Bantul dilayani oleh Gardu induk di Jalan Parangtritis dengan trafo berkapasitas 60 MVA sebanyak 2 unit.

2.6.2.4. Telepon

Jaringan telepon dengan kabel yang dilayani oleh PT Telkom belum menjangkau wilayah pesisir. Hal ini mengingat kawasan pesisir yang pada umumnya kawasan wisata lebih banyak terlayani oleh sambungan telepon udara (tanpa kabel) yang disediakan oleh pihak swasta. Sejauh ini pihak PT Telkom berencana menambah jaringan telepon di sepanjang kawasan pesisir, namun menunggu realisasi pembangunan jalur jalan lintas selatan. Kendala yang dihadapi oleh PT Telkom adalah jarak antar hunian yang jauh, animo masyarakat yang sangat kurang serta kendala biaya investasi yang besar.

BAB III

KERANGKA STRATEGI DAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN

3.1. VISI DAN MISI

Visi:

Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang sejahtera berkelanjutan

Misi:

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya serta pelestarian kawasan konservasi dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pembangunan sosial-ekonomi rakyat.
- c. Membangun sistem dan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil menuju ekonomi rakyat yang tangguh.
- d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan mengoptimalkan modal sosial-budaya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- e. Mengembangkan sistem mitigasi dan pengelolaan bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tangguh.

Visi tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:

(1). Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil adalah masyarakat yang hidup dan mendiami wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melakukan kegiatan-kegiatan produktif pengelolaan sumber daya perikanan, kelautan, pertanian, wisata, dan jasa-jasa lingkungan secara lestari dan bertanggung jawab.

(2). Sejahtera

Sejahtera mengandung pengertian bahwa masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dapat memanfaatkan sumber daya perikanan, kelautan, pertanian, wisata, serta jasa-jasa lingkungan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.

(3). Berkelanjutan

Berkelanjutan mengandung pengertian bahwa sumber daya perikanan, kelautan, pertanian, wisata, dan jasa-jasa lingkungan dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal dan profesional oleh masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan (lestari dan bertanggung jawab).

3.2. ISU-ISU STRATEGIS PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

3.2.1. Sumber Daya Alam

- a. Belum optimalnya penghijauan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- b. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam (gempa bumi, abrasi dan erosi, gelombang pasang, tanah longsor, tsunami, banjir) serta kerusakan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun.
- c. Terjadinya intrusi air laut terutama pada kawasan pantai berpasir.
- d. Terdapat beragam objek wisata yang belum dikelola secara optimal (wisata alam, kuliner, spiritual, pendidikan/penelitian, olahraga, dan minat khusus).
- e. Besarnya potensi sumberdaya ikan di zona lebih 12 mil dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- f. Belum optimalnya perhatian pemangku kepentingan terhadap pengelolaan lingkungan laut.
- g. Karakteristik pantai selatan yang bergelombang besar dan berpaling tidak memungkinkan untuk melaut setiap saat.
- h. Potensi konflik dalam pemanfaatan sumber daya wilayah.

3.2.2. Sumber Daya Manusia

- a. Terbatasnya kemampuan dan keahlian masyarakat pesisir dalam pengelolaan kegiatan perikanan, kelautan, pertanian, dan wisata.
- b. Rendahnya kemandirian masyarakat pesisir dalam penyediaan sarana produksi dan distribusi hasil perikanan, kelautan, dan pertanian.
- c. Pergeseran sistem nilai dan norma budaya masyarakat pesisir akibat interaksi dengan pendatang yang bersumber dari kegiatan pendukung pariwisata.
- d. Persaingan nelayan lokal dengan nelayan pendatang dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan.
- e. Terbatasnya regenerasi di bidang perikanan dan kelautan serta pertanian.

3.2.3. Infrastruktur

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana di wilayah pesisir yang mendukung kegiatan perikanan dan kelautan, pertanian, serta pariwisata.
- b. Terdapatnya potensi energi alternatif, seperti tenaga angin, surya, gelombang, dan biogas.
- c. Pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) dapat membangkitkan kegiatan ekonomi wilayah.
- d. Adanya pengembangan sarana dan prasarana perikanan (armada tangkap dan pelabuhan perikanan) yang dapat mendorong peningkatan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan.

3.2.4. Ekonomi

- a. Belum terintegrasinya kegiatan wisata (bahari, spritual, pendidikan, kuliner), perikanan dan kelautan serta pertanian secara baik.
- b. Visi Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menjadikan Indonesia sebagai penghasil produk perikanan dan kelautan terbesar di dunia pada tahun 2015.

- c. Adanya peluang pasar komoditas perikanan dan kelautan serta pertanian yang masih terbuka.

3.2.5. Kelembagaan

- a. Belum terkoordinasinya perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal.
- b. Kurangnya kontribusi lembaga pendidikan, ekonomi, dan sosial dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

3.3. TUJUAN DAN SASARAN

a. Ekologi

Tujuan: mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan.

Sasaran:

- 1). Meningkatnya pengelolaan ekosistem serta sumber daya perikanan dan kelautan yang lestari.
- 2). Meningkatnya kegiatan penangkapan sumber daya perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan.
- 3). Terciptanya usaha tani yang produktif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
- 4). Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berketahanan bencana.

b. Ekonomi

Tujuan: menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif masyarakat.

Sasaran:

- 1). Meningkatnya produktivitas perikanan dan kelautan.
- 2). Meningkatnya produktivitas pertanian.
- 3). Meningkatnya kunjungan wisata.

c. Sosial budaya

Tujuan: mewujudkan masyarakat pesisir yang berbudaya.

Sasaran:

- 1). Meningkatnya masyarakat sadar budaya.
- 2). Meningkatnya kesadaran masyarakat pesisir terhadap kearifan lokal

d. Sarana dan prasarana

Tujuan: meningkatkan aksesibilitas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sasaran:

- Meningkatnya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi wilayah.

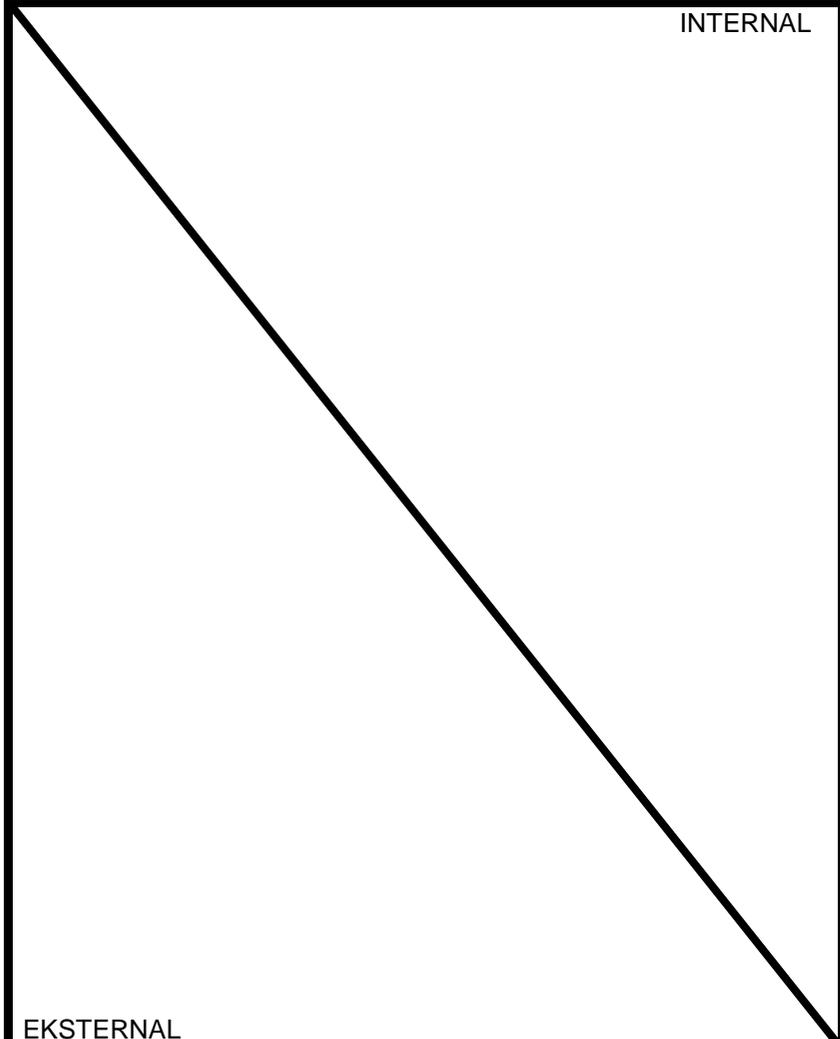
e. Kelembagaan

Tujuan: meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat.

Sasaran:

- 1). Meningkatnya fungsi dan peranan kelembagaan masyarakat.
- 2). Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar *pemangku kepentingan*.

Table 3-1 Strategi dan Arah Kebijakan

<p>INTERNAL</p>  <p>EKSTERNAL</p>	Strength (S)	Weakness (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekuatan angin yang cukup besar, sinar matahari yang melimpah, gelombang laut yang besar 2. Terdapat beragam objek wisata dengan berbagai karakteristik alamnya yang menarik 3. Besarnya potensi sumberdaya ikan pelagis besar dan kecil di ZEEI 4. Masih adanya budaya gotong-royong masyarakat pesisir 5. Kawasan Pantai Selatan DIY sudah dikenal oleh wisatawan sebagai daerah tujuan wisata 6. Dibangunnya Pelabuhan Perikanan Nusantara Glagah Karangwuni Kulon Progo 7. Potensi pemanfaatan kotoran ternak untuk kegiatan pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya konservasi sumberdaya pesisir dan kelautan 2. Wilayah pesisir memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, kerusakan sumberdaya, serta intrusi air laut 3. Penataan kawasan wisata belum optimal 4. Sarana dan prasarana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kurang memadai 5. Terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat pesisir 6. Rendahnya kemandirian masyarakat pesisir dalam penyediaan sarana produksi dan distribusi hasil pertanian dan perikanan 7. Berbagai organisasi masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan pendapatan masyarakat 8. Pemanfaatan sumberdaya ikan di perairan lepas pantai masih sangat rendah 9. Kapasitas armada dan peralatan penangkapan ikan belum memadai 10. Terbatasnya pelabuhan perikanan yang mampu didarati oleh kapal-kapal besar 11. Masyarakat pesisir yang belum secara optimal menjadi subyek pembangunan 12. Penataan ruang yang belum terkoordinasi secara optimal 13. Kegiatan penangkapan ikan belum sepenuhnya memperhatikan kelestarian lingkungan 14. Rendahnya jiwa bahari masyarakat

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Opportunity (O)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan JJLS meningkatkan akses pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 2. Visi Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menjadikan Indonesia sebagai penghasil produk perikanan dan kelautan terbesar di dunia pada tahun 2015 3. Terdapatnya peluang pasar komoditi perikanan, kelautan, dan pertanian di DIY, nasional, dan internasional 4. Kebijakan KKP untuk menjadikan Gunungkidul dan Kulon Progo sebagai kawasan pengembangan minapolitan 	<p>Strategi 1 (S-O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan JJLS sebagai koridor utama pelayanan bagi kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 2. Peningkatan kegiatan minapolitan untuk mendukung produktivitas perikanan 3. Pengembangan pemanfaatan sumber energi alternatif 4. Peningkatan <i>branding</i> kawasan pesisir sebagai kawasan bahari 5. Melestarikan budaya gotong-royong dan organisasi masyarakat sebagai modal sosial dalam pembangunan 	<p>Strategi 2 (O-W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat 2. Pengendalian kegiatan ekonomi yang dapat merusak norma dan budaya masyarakat 3. Peningkatan kapasitas masyarakat pesisir dalam bidang perikanan, kelautan, pertanian, dan pariwisata 4. Pengembangan penangkapan ikan yang ramah lingkungan 5. Penataan wilayah berbasis mitigasi bencana 6. Peningkatan jiwa bahari masyarakat 7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
--	--	---	---

Threats (T)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya perubahan iklim global 2. Pergeseran sistem nilai dan norma budaya masyarakat pesisir akibat interaksi dengan pendatang. 3. Adanya persaingan nelayan lokal dengan nelayan pendatang yang tidak seimbang dalam hal alat tangkap yang lebih modern dan tingkat produktivitasnya 4. Timbulnya persaingan usaha yang tinggi antar sesama masyarakat lokal maupun dengan para investor baik di bidang bisnis, jasa, seni maupun budaya 5. Potensi konflik dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah 	<p>Strategi 3 (S-T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan budidaya perikanan darat 2. Pengembangan kegiatan pariwisata dan pendukungnya yang sesuai dengan budaya dan kearifan lokal 3. Pengembangan regulasi dan peningkatan koordinasi antar pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan 4. Perlu koordinasi dan pengembangan kemitraan dalam berbagai kegiatan usaha yang ada di kawasan pesisir dan sekitarnya 	<p>Strategi 4 (W-T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan kawasan konservasi berbasis kearifan lokal 2. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat pesisir dalam penggunaan alat tangkap ramah lingkungan 3. Penguatan nilai-nilai religius dan norma budaya masyarakat 4. Peningkatan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir 5. Peningkatan koordinasi antar <i>pemangku kepentingan</i> dalam penataan ruang 6. Penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi
-------------	--	---	---

3.4. TARGET DAN INDIKATOR KEGIATAN

Tabel 3-2 Strategi, Kebijakan dan Rencana Kerja

Tujuan 1 : Mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan					
Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Indikator	Target
Meningkatnya pengelolaan ekosistem serta sumberdaya perikanan dan kelautan yang lestari.	Pengaturan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan yang lestari	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistem laut untuk pemanfaatan sumberdaya ikan yang optimal (<i>optimal fishing</i>).	Penyuluhan, Pelatihan dan pendampingan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan kemandirian dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	Semua masyarakat pesisir memahami konsep pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lestari
Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Indikator	Target
Meningkatnya kegiatan penangkapan sumberdaya perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan.	Pengembangan alat tangkap yang sesuai dengan daya dukung lingkungan	Meningkatkan jumlah alat tangkap yang sesuai dengan daya dukung lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pengetahuan tentang kegiatan penangkapan yang ramah lingkungan Pengadaan alat tangkap yang ramah lingkungan 	Meningkatnya kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> Semua nelayan memiliki pengetahuan dan ketrampilan penangkapan ikan yang ramah lingkungan Semua alat yang dimiliki nelayan sudah ramah lingkungan
Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Indikator	Target
Terciptanya usaha tani yang produktif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.	Peningkatan produktivitas usaha tani berbasis pada pemanfaatan lahan secara optimal.	Mengembangkan sistem usaha tani yang ramah lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan sistem pertanian organik. Pengembangan sistem pertanian terpadu. Penggunaan input produksi berimbang. 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya produksi. Meningkatnya produktivitas lahan. Meningkatnya penggunaan sarana produksi ramah lingkungan. 	Semua lahan pertanian pesisir mengalami peningkatan produksi dan produktivitas.

Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Indikator	Target
Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berketahanan bencana.	Penataan wilayah berbasis mitigasi bencana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kegiatan penataan wilayah berbasis mitigasi bencana 2. Meningkatkan kesadaran mitigasi bencana kepada pemangku kepentingan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan evakuasi bencana kepada masyarakat. 2. Penguatan kelembagaan terkait dengan mitigasi bencana. 3. Penetapan kawasan bencana. 4. Penyusunan peraturan zonasi kawasan rawan bencana. 5. Perencanaan dan pembangunan lokasi jalur evakuasi. 6. Penyusunan rencana aksi penanggulangan daerah bencana. 	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pendukung mitigasi bencana. Meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap mitigasi bencana.	Terbangunnya infrastruktur pendukung mitigasi bencana dan meningkatnya kesadaran masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Tujuan 2 : Menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif masyarakat					
Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Indikator	Target
Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah.	Pengadaan sarana dan prasarana wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.	Pembangunan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan perekonomian wilayah.	Peningkatan aksesibilitas wilayah. Peningkatan sarana ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan budaya.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah.	Terbangunnya sarana dan prasarana wilayah pada seluruh desa pesisir dan pulau-pulau kecil.
Tujuan 2 : Menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif					
Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Indikator	Target
Meningkatnya kunjungan wisata	<i>Branding</i> wilayah Pesisir sebagai kawasan wisata	Pengembangan konsep pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata 2. Pembinaan masyarakat 3. Pemberian insentif kepada masyarakat dan pelaku usaha 	Peningkatan peranserta masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan.	Meningkatnya pendapatan masyarakat Meningkatnya PAD pemerintah daerah

Tujuan 2 : Menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif					
Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Indikator	Target
Meningkatnya jumlah pengunjung pariwisata	<i>Branding</i> Kawasan Pesisir sebagai kawasan bahari dijadikan sebagai salah satu dasar untuk memacu pembangunan fisik dan non fisik sehingga akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi	Menciptakan konsep pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran instansi terkait dan biro jasa dalam mempopulerkan kawasan pesisir. 2. Menciptakan iklim investasi yang bagus. 3. Pemasaran dan pengiklanan yang efektif dan kreatif. 4. Mengembangkan system kombinasi pendapatan masyarakat antara pekerjaan lama dengan pekerjaan baru di bidang kepariwisataan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kegiatan atraksi wisata 2. Meningkatnya lama tinggal pengunjung 	Terbangunnya wahana-wahana wisata yang beragam di semua kawasan wisata
Tujuan 2 : Menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif					
Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Indikator	Target
Meningkatnya pendapatan masyarakat pesisir	Pemberian insentif agar tercipta peningkatan peluang usaha seperti usaha seni, budaya dan jasa-jasa di bidang kepariwisataan serta usaha-usaha lain yang terkait.	Mengembangkan lembaga kepariwisataan yang profesional di Kawasan Pesisir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian kemudahan ijin berinvestasi 2. Meningkatkan kualitas SDM lokal agar mampu 3. menghadapi perkembangan pembangunan di wilayah pesisir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pendapatan masyarakat pesisir 2. Meningkatnya lapangan kerja bagi masyarakat pesisir 	Terciptanya lapangan kerja yang mengakomodir kebutuhan kerja masyarakat pesisir
Tujuan 2 : Menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif					
Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Indikator	Target
Meningkatnya produktivitas perikanan dan kelautan	Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui usaha perikanan dan kelautan.	Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat perikanan dan kelautan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan dan pendampingan usaha masyarakat 2. Fasilitasi (kemudahan) akses sumber daya kepada masyarakat 3. Korporatisasi hasil perikanan dan kelautan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kegiatan usaha perikanan dan kelautan 2. Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan 	Peningkatan pendapatan masyarakat.

Tujuan 2 : Menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif					
Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Indikator	Target
Meningkatnya produktivitas pertanian	Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui usaha pertanian	Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat pertanian	4. Pelatihan dan pendampingan usaha masyarakat 5. Fasilitasi (kemudahan) akses sumber daya kepada masyarakat 6. Korporatisasi hasil pertanian	Meningkatnya kegiatan usaha pertanian Meningkatnya produksi pertanian	Peningkatan pendapatan masyarakat.
Tujuan 3 : Mewujudkan masyarakat pesisir yang berbudaya					
Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Indikator	Target
Meningkatnya masyarakat sadar budaya	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan budaya masyarakat pesisir	Melestarikan budaya masyarakat pesisir	Pelatihan pengembangan budaya lokal kepada masyarakat pesisir	Meningkatnya kegiatan / atraksi budaya lokal	Memasyarakatkan pariwisata dan mempariwisatakan masyarakat
Tujuan 3 : Mewujudkan masyarakat pesisir yang berbudaya					
Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Indikator	Target
Meningkatnya kesadaran masyarakat pesisir terhadap kearifan lokal	Pengembangan masyarakat pesisir berbasis kearifan lokal	Melestarikan kearifan lokal	Peningkatan peran kelompok masyarakat lokal dalam pengembangan kearifan lokal	meningkatnya kegiatan budaya berbasis kearifan lokal	Memasyarakatkan budaya masyarakat berbasis kearifan lokal
Tujuan 4 : Meningkatkan aksesibilitas wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil					
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Target
Meningkatnya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi wilayah	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana wilayah	Pengembangan sarana prasarana wilayah	Pembangunan sarana prasarana wilayah	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana wilayah	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana wilayah

Tujuan 5a: Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat					
Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Indikator	Target
Meningkatnya fungsi dan peranan kelembagaan masyarakat	Meningkatkan kualitas SDM	Pengembangan kualitas SDM	Pendidikan dan pelatihan SDM	1. Meningkatnya jumlah SDM yang berkualitas 2. Meningkatnya fungsi dan peranan kelembagaan	Terbentuknya kelembagaan masyarakat yang mandiri
Tujuan 5b : Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat					
Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Indikator	Target
Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar <i>pemangku kepentingan</i>	Peningkatan sistem koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan	Meningkatkan sistem koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan dalam peningkatan fungsi dan peran kelembagaan	Optimalisasi sistem koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kelembagaan.	Peningkatan kerjasama antar lembaga	Meningkatnya sinergi antar pemangku kepentingan

BAB IV

KAJIDAH PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN

4.1. LANGKAH-LANGKAH EFEKTIF PELAKSANAAN RSWP-3-K

Pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan proses pembangunan yang bertahap dan berkelanjutan. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan secara bertahap mengikuti kaidah-kaidah terencana, yang terdiri atas 4 (empat) konsepsi perencanaan, yakni: (1) penyusunan RSWP-3-K, (2) RZWP-3-K, (3) RPWP-3-K dan (4) RAPWP-3-K. Pengelolaan wilayah pesisir disusun secara terencana karena harus selalu mengikuti perubahan dan munculnya isu-isu strategis terkini, sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap isu-isu tersebut untuk menentukan langkah-langkah perencanaan yang lebih tepat dan antisipatif sesuai dengan perkembangan ipteks (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni). Sehubungan dengan dinamika perubahan tersebut, prioritas strategi perlu dievaluasi dan direview secara baik pada setiap kurun waktu 5 (lima) tahun dalam jangka panjang perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

Proses implementasi dari RSWP-3-K Provinsi DIY diuraikan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi perencanaan. Sesuai dengan kerangka kerja pengelolaan pesisir terpadu, RSWP-3-K Provinsi DIY merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan yang lebih spesifik seperti Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi Penelolaan. Seperti dikemukakan di atas, RSWP-3-K Provinsi DIY merupakan dokumen yang dinamis untuk jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun, namun demikian dokumen ini harus ditinjau ulang kembali (*review*) secara bertahap setiap 5 (lima) tahun, dengan mengacu pada keberhasilan dan hambatan pelaksanaan program pembangunan daerah (Provinsi/Kota/Kabupaten).

Dalam implementasi program, perlu ditunjuk koordinator program (*leading sector*) berdasarkan cakupan dan keunggulan bidang/sector terkait, namun secara substansial perencanaan program pengelolaan wilayah pesisir secara keseluruhan dikoordinir oleh Bappeda (sebagai Ketua) dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (sebagai Sekretaris), serta berbagai dinas/instansi (*stakeholder*) terkait. Secara umum, tanggung jawab diantara *stakeholder* terkait perlu disusun secara hierarki guna memahami tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Hal ini diperlukan untuk menjamin adanya kejelasan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan wewenang (KISW) saat *stakeholder* berpartisipasi dalam implementasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi DIY.

Penunjukkan institusi pemerintah dan nonpemerintah dalam implementasi pelaksanaan RSWP-3-K, harus didasarkan pada pertimbangan tugas pokok dan fungsi institusi terkait. Dinas/instansi yang disebutkan pertama merupakan dinas/instansi sebagai penanggungjawab (*leading sector*). Adapun tahap-tahap implementasi RSWP-3-K Provinsi DIY dalam penyusunan dokumen RSWP-3-K adalah sebagai berikut.

- 1). Tahap Sosialisasi Dokumen RSWP-3-K:
 - a). Persiapan.
 - b). Pengesahan dokumen.
 - c). Penerbitan dan publikasi dokumen.

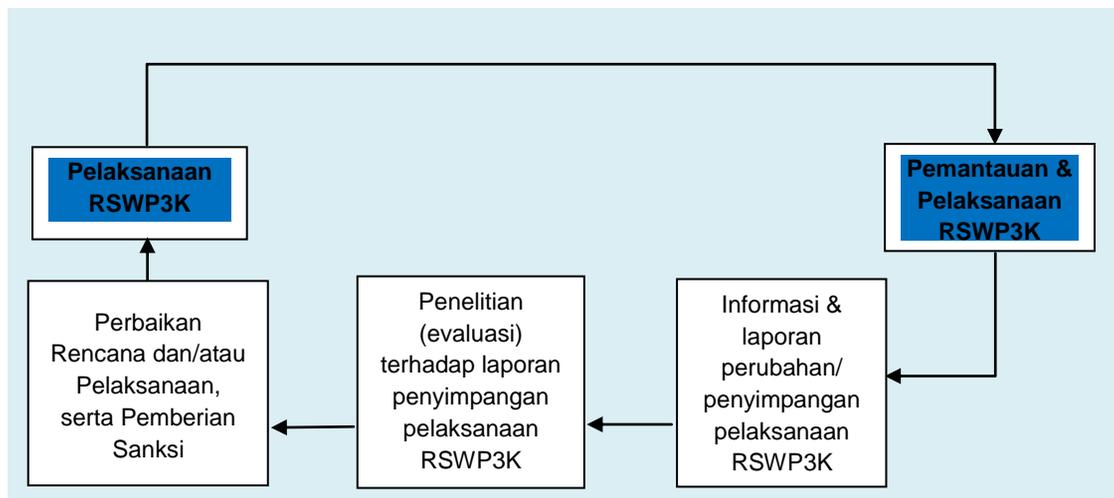
- 2). Tahap Penerapan Dokumen RSWP-3-K:
 - a). Pelaksanaan program-program pembangunan yang mengacu pada RSWP-3-K.
 - b). Penyelarasan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan RSWP-3-K.
 - c). Penciptaan sinergi antarprogram pembangunan yang sudah berjalan dengan program pembangunan yang diamanatkan oleh RSWP-3-K.
- 3). Tahap pengawasan pelaksanaan pembangunan :
 - a). Pengawasan proses pembangunan sesuai dengan arahan RSWP-3-K.
 - b). Evaluasi terhadap hasil pembangunan berdasar arahan RSWP-3-K.

4.2. PEMANTAUAN KEMAJUAN PELAKSANAAN RSWP-3-K

Pemantauan atas kinerja rencana strategis merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus sebagai indikator efektifitas evaluasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pelaksanaan RSPWP-3-K perlu dikaji ulang (*review*) pada setiap kurun waktu 5 (lima) tahun sekali.

Kaji ulang terhadap rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi DIY harus dilakukan secara baik, transparan, dan terukur, dengan arahnya dan substansinya tetap menyesuaikan dengan ruang-lingkup dan kebutuhan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi DIY, serta perkembangan ipteks di bidang pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hasil kaji ulang harus dilaporkan secara bertahap dan kontinu untuk mendapatkan data/informasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara menyeluruh.

Mekanisme pelaporan merupakan proses pemberian informasi secara obyektif mengenai hasil implementasi RSWP-3-K yang dilakukan oleh masyarakat dan instansi yang berwenang. Mekanisme pemantauan mencakup pengamatan dan pemeriksaan dengan cermat proses dan hasil pembangunan berdasarkan arahan RSWP-3-K, baik kondisi yang sesuai maupun tidak sesuai yang dilakukan oleh dinas/instansi berwenang. Berikut mekanisme/prosedur pelaporan dan pemantauan oleh dinas/instansi berwenang dalam pelaksanaan pembangunan (Gambar 4-1).



Gambar 4-1. Proses Penertiban Pelaksanaan RSWP-3-K

4.3. LOKAKARYA PELATIHAN PEMAHAMAN SUBSTANSI RSWP-3-K

Lokakarya yang dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman serta meningkatkan wawasan terhadap substansi RSWP-3-K adalah:

1). Prasosialisasi di Tingkat Kabupaten

Kegiatan prasosialisasi ini merupakan bagian dari pekerjaan yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan sosialisasi RSWP-3-K Provinsi DIY.

2). Sosialisasi di Tingkat Kabupaten

Sosialisasi ditujukan untuk menjelaskan materi RSWP-3-K Provinsi DIY kepada *stakeholder* di daerah, dengan harapan seluruh pemangku kepentingan dapat memahami dan memberi dukungan terhadap rencana operasional RSWP-3-K di wilayah masing-masing.

3). Lokakarya di Tingkat Provinsi

Diskusi pemantapan laporan akhir dilakukan melalui Lokakarya di tingkat Provinsi dengan melibatkan berbagai dinas/instansi/*stakeholder* terkait. Tujuan pelaksanaan lokakarya tingkat provinsi adalah untuk membahas dan merumuskan kembali hasil-hasil sosialisasi substansi RSWP-3-K di masing-masing aspek pembangunan sebagai acuan resmi/formal dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan atau Peraturan Daerah (Perda) yang siap dilaksanakan. Pelaksanaan lokakarya ini merupakan permufakatan akhir dari masing-masing utusan dinas/instansi/*stakeholder* yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Masukan, perbaikan, dan kata sepakat yang telah disampaikan diharapkan akan memperkaya substansi Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas oleh pihak eksekutif (dinas/instansi/*stakeholder*) dan legislatif.

4.4. PEMBAHASAN (RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR) RAPERGUB DI TINGKAT PROVINSI

Pembahasan akhir Rapergub RSWP-3-K pada lokakarya di tingkat Provinsi merupakan tahap akhir pembahasan substansi antardinas/instansi dan stakeholder terkait, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan usulan penetapan RSWP3K menjadi Peraturan Gubernur. Langkah-langkah perasional selanjutnya dari pengesahan Peraturan Gubernur adalah Sosialisasi Peraturan Gubernur kepada seluruh pihak pemangku kepentingan dan atau pengambil kebijakan untuk dijadikan sebagai acuan dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

4.5. WORKSHOP PEMANTAUAN KINERJA INSTANSI DAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT RSWP-3-K

Seminar dan/atau *workshop* yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memantau kinerja instansi serta pemangku kepentingan sesuai dengan RSWP-3-K adalah:

1). Seminar kajian pemantauan pelaksanaan prioritas program pembangunan.

Pengelolaan pembangunan harus sesuai dengan tujuan, sasaran, serta prioritas program yang telah ditetapkan. Pemantauan pelaksanaan program pembangunan dilakukan untuk memperkecil terjadinya penyimpangan atas proses dan hasil pembangunan. Tujuan dari kajian pemantauan pelaksanaan prioritas program pembangunan adalah untuk menyusun rekomendasi yang bersifat strategis sehingga dapat digunakan para pengambil keputusan di tingkat provinsi dan daerah dalam mengetahui dampak pemantauan terhadap kinerja pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan RSWP-3-K.

2). *Workshop* pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RSWP-3-K oleh Instansi terkait.

Kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja masing-masing *stakeholder* dalam implementasi RSWP-3-K serta merumuskan kembali kerangka kerja antar*stakeholder* (tugas, tanggung jawab, dan kewenangan) berdasarkan hasil evaluasi.

3). *Workshop* pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RSWP-3-K oleh masyarakat.

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pencapaian tahap kemajuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan yang berdasar pada RSWP-3-K, serta kemajuan pengetahuan, keterampilan dan perilaku anggota masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001